

LAPORAN AKHIR IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

YUSENGHAN

STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM

PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

DI PROVINSI ACEH



Oleh :

MULIADI, S.H., M.H.
NDH. 22

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XVIII Tahun 2022

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI BANDUNG
2022



LEMBAR PERSETUJUAN

YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH

Peserta Diklat

MULIADI, S.H., M.H.
NDH. 22

Telah disetujui pada tanggal : November 2022
Di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

COACH,

MENTOR,

Dr. Ir. RETNO SETIJOWATI, M.S.
NIP. 19600730 198603 2 004

AKBP HAIRAJADI, S.H.
NRP. 70070812





ABSTRAK

Permasalahan pertanahan di Provinsi Aceh merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.

Kondisi organisasi saat ini terkait konflik bidang pertanahan di Provinsi Aceh, antara lain banyak perkara yang menyangkut bidang pertanahan, terjadinya konflik sosial antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat, belum jelasnya tapal batas antara kawasan hutan dengan APL, tidak adanya bank data alas hak atas tanah non sertifikat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan alas hak atas tanah. Dari kondisi tersebut maka kondisi yang diharapkan meminimalisir perkara yang menyangkut pertanahan, meniadakan atau meminimalisir potensi terjadinya konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat, adanya kejelasan tapal batas antara kawasan hutan dengan apl, adanya bank data alas hak atas tanah non sertifikat, dan terciptanya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan alas hak atas tanah.

Melalui penyusunan proyek perubahan solusi yang digagas dan menjadi terobosan perubahan bagi unit organisasi yaitu Strategi pendekatan soft approach dalam penyelesaian konflik bidang pertanahan di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: pertanahan, konflik dan strategi soft approach





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Proyek Perubahan yang berjudul Yusenghan Strategi Pendekatan Soft Approach Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Aceh.

Penyusunan Laporan Proyek Perubahan sebagai proses pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2022 yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri.

Laporan Proyek perubahan ini merupakan sebuah pemikiran sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan publik Subdit II Ditreskrimum Polda Aceh, yang diharapkan dapat menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Laporan Proyek Perubahan ini berhasil project leader selesaikan berkat dukungan banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan. Oleh karena itu, kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dari dalam hati kepada:

1. Irjen Pol Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M, Kapolda Aceh;
2. Kombes Pol Ade Harianto, S.H., MH., Dirreskrimum Polda Aceh;
3. AKBP Hairajadi, S.H, Wadir Reskrimum Polda Aceh selaku Mentor;
4. Dr. Ir. Retno Setijowati, M.S., selaku coach yang selalu sabar mendengar dan memberikan bimbingan sehingga menyusun naskah ini terasa lebih mudah dan ringan;
5. Seluruh stakeholder, Tim Efektif Proyek Perubahan serta seluruh pihak yang turut serta mendukung rancangan proyek perubahan ini;
6. Keluarga tercinta yang telah mendoakan, memberikan semangat, dukungan moril, spiritual dan pengorbanan yang luar biasa dan tulus.





Kami menyadari bahwa Rancangan Proyek Perubahan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran kami harapkan demi sempurnanya laporan ini. Semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa memberikan kemudahan, kekuatan dan kesehatan di setiap upaya untuk memberikan karya yang terbaik bagi bangsa, negara dan Polri khususnya.

Banda Aceh, November 2022

Peserta

MULIADI, S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73040646





DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PROYEK PERUBAHAN	
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Proyek Perubahan	2
C. Analisis Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat untuk Organisasi Adaptif	5
E. Output dan Outcome	6
BAB II LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN	
A. Capaian Hasil Implementasi Proper (sesuai tujuan dan milestones jangka pendek)	8
B. Deskripsi Kepemimpinan Strategis	9
C. Implementasi Strategi Marketing	12
D. Keberlanjutan Proyek Perubahan	19
E. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar	20
F. Pemanfaatan mata pelatihan pilihan untuk implementasi Proyek Perubahan	25
G. Lesson Learn	29
BAB III SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	31
B. Saran	31
LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penentuan Prioritas Isu Aktual Berdasarkan Kondisi Saat Ini	4
Tabel 2.1 Capaian Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek (2 bulan)	8
Tabel 2.2 Tahapan Perubahan Rencana Strategis (6 Bulan)	19
Tabel 2.3 Tahapan Perubahan Rencana Strategis (12 Bulan)	19





DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Causal Tree Prioritas Alternatif	5
Gambar 2.1 Dukungan Stakeholder Sebelum Pelaksanaan Proyek Perubahan	13
Gambar 2.2 Dukungan Stakeholder Sesudah Pelaksanaan Proyek Perubahan	13
Gambar 2.3 Strategi Komunikasi	14
Gambar 2.4 Strategi Marketing	15
Gambar 2.5 Struktur Tim Efektif	16





BAB I

PROYEK PERUBAHAN

A. Latar Belakang

Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2''$ - $06^{\circ} 04' 33,6''$ lintang utara dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ - $98^{\circ} 17' 13,2''$ bujur timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2012 Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa.



Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.290.874 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 800.553 ha. Sedangkan lahan perusahaan perkebunan (HGU) mempunyai luas areal yaitu 370.000 ha yang terdiri dari 180 perusahaan.

Subdit II Ditreskrimum Polda Aceh merupakan salah satu pelaksana tugas pokok Polri yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan harta dan benda, bangunan dan tanah di wilayah hukum Provinsi Aceh. Personil Subdit II Ditreskrimum Berjumlah 32 personil yang terdiri dari pamen 1 personil, pama 5 personil dan bintara sebanyak 26 personil.

Permasalahan pertanahan di Provinsi Aceh merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.



Berbagai kasus pertanahan yang disebabkan oleh pengelolaan pertanahan dan muncul bersamaan dengan belum terjaminnya kepastian hak atas tanah. Berbagai kasus pertanahan di Provinsi Aceh cenderung mengalami peningkatan. Pada semester I tahun 2021 tercatat 25 kasus sedangkan pada semester I tahun 2022 tercatat 38 kasus (meningkat 65%).

B. Deskripsi Proyek Perubahan

a. Permasalahan

1. Masih banyak lahan yang tidak produktif (lahan tidur) di wilayah Provinsi Aceh.
2. Adanya klaim sepihak atas penguasaan tanah akibat dari tidak didaftarkannya bidang tanah yang dikuasai.
3. Kurang sinergi antar pemangku kepentingan sehingga menghambat penyusunan RTRW (rencana tata ruang wilayah) di Provinsi Aceh.
4. Banyaknya perkara yang masuk ke lembaga peradilan yang diselesaikan dengan hasil yang kurang memuaskan.
5. Sering ditemukan hilangnya surat/warkah yang diperlukan untuk pembuktian baik di tingkat pemerintahan desa, kelurahan, kecamatan dan kantor pertanahan.

b. Permasalahan Pokok

Meningkatnya konflik bidang pertanahan di Provinsi Aceh.

c. Kondisi Saat Ini

1. Banyak perkara yang menyangkut bidang pertanahan.
2. Terjadinya konflik sosial antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat.
3. Belum jelasnya tapal batas antara kawasan hutan dengan APL.



4. Tidak adanya bank data alas hak atas tanah non sertifikat.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan alas hak atas tanah.

d. Kesenjangan/Gap

Belum terselenggaranya:

1. Inventarisasi / pendataan alas hak atas tanah non sertifikat
2. Integrasi dan sinkronisasi kewenangan penanganan kasus pertanahan.
3. Giat sosialisasi bersama stakeholder tentang hak dan kewajiban pemanfaatan tanah non sertifikat bagi masyarakat.

e. Kondisi Yang Diharapkan

1. Dapat meminimalisir perkara yang menyangkut pertanahan.
2. Dapat meniadakan atau meminimalisir potensi terjadinya konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat.
3. Adanya kejelasan tapal batas antara kawasan hutan dengan apl.
4. Adanya bank data alas hak atas tanah non sertifikat.
5. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan alas hak atas tanah.

f. Beberapa Alternatif Solusi

1. Membentuk Satgas yustisi terpadu dengan melibatkan stakeholder terkait yang memiliki kewenangan khusus penanganan perkara di bidang pertanahan.
2. Membentuk tim efektif inventarisasi pendataan alas hak atas tanah non sertifikat (bank data).
3. Meminta gubernur untuk mengeluarkan kebijakan pembentukan satgas yustisi terpadu.
4. Menyusun MoU dan SOP (Standar Operasional Prosedur).

5. Menyusun Qanun (perda) tentang penyelesaian konflik pertanahan.

g. Solusi

Strategi pendekatan soft approach dalam penyelesaian konflik bidang pertanahan di Provinsi Aceh.

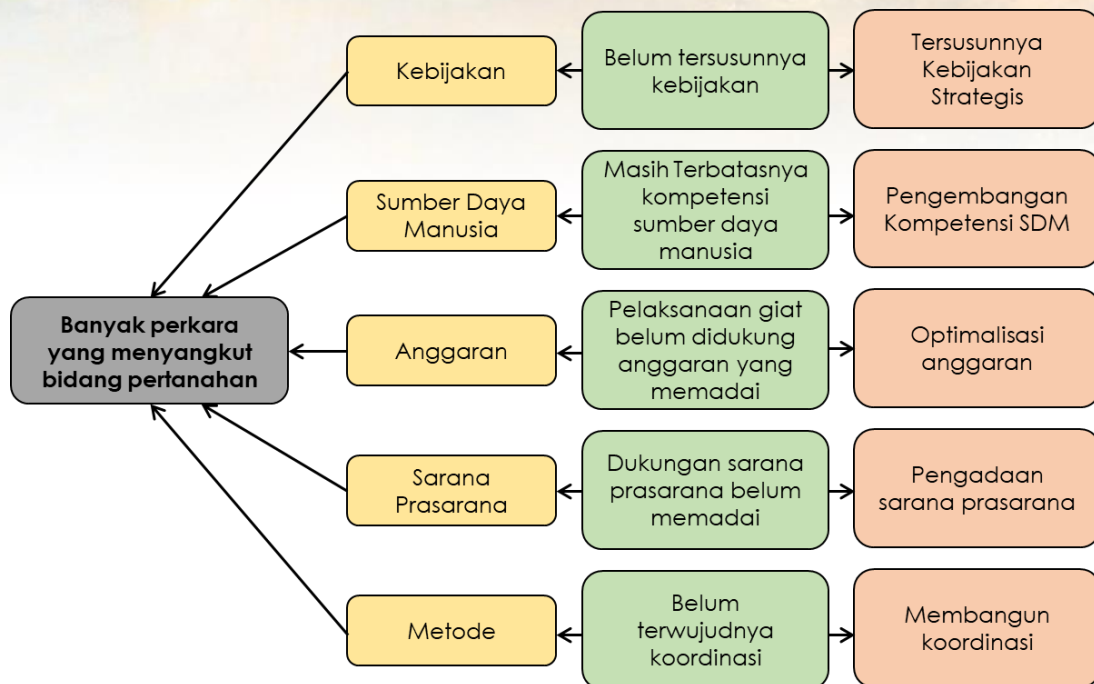
C. Analisis Masalah

Berdasarkan kondisi saat ini, melalui Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) adalah salah satu metode skoring untuk menyusun urutan prioritas isu aktual yang harus diselesaikan, dengan penentuan prioritas isu aktual berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Penentuan Prioritas Isu Aktual
Berdasarkan Kondisi Saat Ini

No.	Kondisi saat ini	U	S	G	Jml	Rank
1.	Banyak perkara yang menyangkut bidang pertanahan	5	5	5	15	1
2.	Terjadinya konflik sosial antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat	5	4	4	13	2
3.	Belum jelasnya tapal batas antara kawasan hutan dengan APL	4	4	4	12	3
4.	Tidak adanya bank data alas hak atas tanah non sertifikat	4	4	3	11	4
5.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan alas hak atas tanah	4	3	3	10	5

Matrik analisis USG memberikan hasil bahwa prioritas permasalahan yang menduduki peringkat pertama adalah **banyak perkara yang menyangkut bidang pertanahan**. Setelah di dapat prioritas permasalahan, selanjutnya menganalisa melalui causal tree untuk mendapatkan prioritas alternatif terhadap permasalahan yang terjadi, sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 1.1 Causal Tree Prioritas Alternatif

D. Tujuan dan Manfaat untuk Organisasi Adaptif

a. Tujuan

1. Jangka Pendek (2 Bulan)

Strategi penyelesaian konflik bidang pertanahan di Provinsi Aceh dengan pendekatan soft approach melalui pembentukan Satgas Yusenghan (yustisi sengketa lahan).

2. Jangka Menengah (6 Bulan)

Pemutakhiran dan inventarisasi pendataan alas hak atas tanah non sertifikat.

3. Jangka Panjang (12 Bulan)

Terwujudnya strategi penyelesaian konflik bidang pertanahan di Provinsi Aceh dengan pendekatan soft approach.



b. Manfaat

1. Internal

Terciptanya proses penyelesaian tindak pidana konflik bidang pertanahan dengan menggunakan *restorative justice*.

2. Eksternal

Terjalinnya kerja sama antara pemangku kepentingan di Provinsi Aceh dalam meminimalisir potensi terjadinya konflik pertanahan di dalam masyarakat serta adanya wadah menginventarisir terhadap alas hak tanah non sertifikat dan adanya regulasi dari pemerintah Aceh yang intensive memberikan informasi dan himbauan kepada pemilik tanah agar di sertifikasi sehingga konflik pertanahan pun dapat di hindari.

E. Output dan Outcome

a. Output

1. Jangka Pendek (2 Bulan)

- 1) Terbentuknya tim efektif
- 2) Diperolehnya komitmen dan dukungan stakeholder
- 3) Tersusunnya pedoman/petunjuk teknis penyelesaian konflik di bidang pertanahan
- 4) Tersusunnya Draft Surat Keputusan Gubernur tentang pembentukan satgas yustisi terpadu (Yusenghan)
- 5) Terlaksananya sosialisasi

2. Jangka Menengah (6 Bulan)

- 1) Terlaksananya pemutakhiran dan inventarisasi pendataan alas hak atas tanah non sertifikat yang update
- 2) Pengesahan Surat Keputusan Gubernur tentang pembentukan satgas yustisi terpadu (Yusenghan)





- 3) Terlaksannya MoU dengan stakeholder
- 4) Tersusunnya Rancangan Qanun (perda) tentang penyelesaian konflik bidang pertanahan.

3. Jangka Panjang (12 Bulan)

- 1) Pengesahan Qanun (perda) tentang penyelesaian konflik bidang pertanahan
- 2) Terlaksananya penyelesaian konflik bidang pertanahan di Provinsi Aceh

b. Outcome

1. Terlaksananya efektifitas pendekatan soft approach dalam pencegahan dan penanganan konflik bidang pertanahan di Provinsi Aceh.
2. Terwujudnya penyelesaian konflik bidang pertanahan melalui yustisi sengketa lahan di Provinsi Aceh.



BAB II

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Hasil Implementasi Proper (sesuai tujuan dan milestones jangka pendek)

Tabel 2.1 Capaian Implementasi Proyek Perubahan
Jangka Pendek (2 bulan)

No.	Tahapan	Kegiatan	Waktu	Stakeholder Yang terlibat	Evidence	Ket
1.	Persiapan	Pembentukan tim efektif	22 Agustus 2022	- Personel Subdit 2 Ditreskrimum. - Perwakilan Biro Hukum Setda Aceh. - Analis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Aceh. - Staf Subbag Program Monev Data dan Informasi Distanbun Aceh.	Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh (lampiran 1)	Tercapai/ Sesuai Target Jangka Pendek
2.	Pelaksanaan	Penyusunan Draft SK Gubernur dan SOP tentang pembentukan satgas yustisi terpadu (Yusenghan)	19 September 2022	- Pesonel Bidkum Polda Aceh. - Perwakilan Biro Hukum Setda Aceh. - Analis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Aceh. - Staf Subbag Program Monev Data Dan Informasi Distanbun Aceh	Draft SK Gubernur dan SOP tentang pembentukan Satgas Yusenghan (lampiran 2)	Tercapai/ Sesuai Target Jangka Pendek
3.		Mobilisasi stakeholder	3 s.d 7 Oktober 2022	- Kapolda Aceh. - Karo Lemdiklat Polri. - Inspektorat Polhukam Kemenko Polhukam RI. - Kepala PPSPDM Kementerian ATR/BPN RI. - Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh - Sekretaris BPI Kemendes RI. - Sekda Aceh. - Kadis LHK Aceh. - Ketua MPU Aceh. - Ketua MAA.	Pernyataan Dukungan (lampiran 3)	Tercapai/ Sesuai Target Jangka Pendek

				- Kadis Pertanian Aceh. - Kadistanbun Aceh. - Dekan Fakultas Universitas Syiahkuala		
4.		Sosialisasi	17 Oktober 2022	- Kasubbid multimedia Bidhumas Polda Aceh. - Pengelola Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda Aceh. - Analis Hukum Pertanian Kanwil BPN Provinsi Aceh. - Staf subbag program monev data dan informasi Distanbun Aceh. - Para Kanit Subdit 2 Ditreskrimum Polda Aceh. - Staf bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dinas Lhk Aceh - Staf MPU Aceh - Staf sekretaris MAA aceh - Mahasiswa fisip Univ. Malikulsaleh - Mahasiswa FSH uin arraniry - Mahasiswa FH univ. Syiah kuala - Masyarakat umum.	Undangan Daftar Hadir Notulen Rapat Dokumentasi (lampiran 4)	Tercapai/ Sesuai Target Jangka Pendek
5.		Penyusunan Draft MoU	18 Oktober 2022	- Bagkerma Biro Ops Polda Aceh - Subbidsunluhkum Bidkum Polda Aceh - Biro Hukum Setda Aceh	Draft MoU (lampiran 5)	Tercapai/ Percepatan Jangka Menengah
6.	Monitoring dan evaluasi		1 November 2022	- Mentor - Project Leader - Tim Efektif	Laporan (lampiran 6)	Tercapai/ Sesuai Target Jangka Pendek

B. Deskripsi Kepemimpinan Strategis

a. Pembentukan Tim Efektif

Tim Kerja dalam suatu proyek perubahan adalah penentu keberhasilan proyek, oleh karenanya seorang pemimpin strategis

diharuskan merancang pembentukan tim yang selanjutnya disebut membangun Tim Efektif, yaitu Efektif dalam melakukan perubahan. Pada tanggal 22 Agustus 2022, project leader menginisiasi pembentukan tim efektif proyek perubahan yang tertuang dalam Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VIII/DIK.2.5./2022.



b. Penyusunan Draft SOP dan Draft SK Gubernur Tentang Pembentukan Satgas Yusenghan

Senin, 19 September 2022 dilaksanakan rapat penyusunan draft SOP dan draft SK Gubernur tentang pembentukan Satgas



Yusenghan. Pelaksanaan kewenangan penanganan konflik/sengketa yang dilaksanakan secara terkoordinasi, bersinergi serta sebagai narahubung antar stakeholder yang sangat responsif

terhadap permasalahan sengketa/konflik pertahanan, untuk mendukung proyek perubahan sangat diperlukan beberapa dasar hukum yang harus dibuat antara lain SK Gubernur tentang pembentukan Satgas Yusenghan dan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tugas Satgas Yusenghan sebagai pedoman kerja bagi pelaksana tugas.

c. Mobilisasi Stakeholder

Pada tanggal 3 s.d 7 Oktober 2022 dilaksanakan mobilisasi stakeholder proyek perubahan, hal tersebut dilakukan guna membangun komitmen baik dari stakeholder internal dan eksternal maka dilaksanakan mobilisasi stakeholder agar di dapat suatu kesepakatan bersama dan dukungan stakeholder

terhadap keberhasilan tujuan proyek perubahan. Adapun dukungan stakeholder diperoleh dari:

1. Irjen Pol Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M Jabatan Kapolda Aceh.
2. Brigjen Pol Drs. Susilo Teguh Rahardjo, M. Si Jabatan Karo Lemdiklat Polri.
3. Brigjen TNI Fauzi Rusli, S.H., CGCAE Jabatan Inspektorat Polhukam Kemenko Polhukam RI.
4. Dr. Agustyarsyah, S. SiT., S.H., M.P. Jabatan Kepala Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN RI.
5. Dr. Mazwar, SH., M.Hum. Jabatan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh
6. Ir. Razali, M.Si Jabatan Sekretaris BPI Kemendes RI.
7. Bustami S.E., M. Si Jabatan Sekda Aceh.
8. Hanan, S.P., M.M Jabatan Kadis LHK Aceh.
9. Tgk. H. Faisal Ali Jabatan Ketua MPU Aceh.
10. Tgk. Yus Dedi Jabatan Ketua MAA.
11. Ir. Sunarwadi, M. Si Jabatan Kadis Pertanahan Aceh.
12. Ir. Cut Huzaimah Jabatan Kadistanbun Aceh.
13. Dr. M. Gaussyah, SH.,MH. Jabatan Dekan Fakultas Universitas Syiahkuala

d. Sosialisasi

Dalam rangka pelaksanaan strategi marketing sektor publik akan kebermanfaatan proyek perubahan maka project leader melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder internal dan eksternal pada tanggal 17 Oktober 2022. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Rapat koordinasi dan Focus Group



Discussion Penanganan Penyelesaian konflik pertanahan di Aceh dengan soft approach.

e. Penyusunan Draft Mou

Pada tanggal 18 Oktober 2022 dilaksanakan penyusunan draft MoU. Maksud dan tujuan dari penyusunan draft nota kesepahaman antara Polda Aceh dan Pemerintah Aceh adalah sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi mengoptimalkan penanganan sengeta/konflik pertanahan di Aceh.

f. Monitoring Dan Evaluasi

Dipenghujung pelaksanaan tahapan strategis jangka pendek dilaksanakan rapat internal monitoring dan evaluasi pada tanggal 1 November 2022. Bahwa pelaksanaan kegiatan

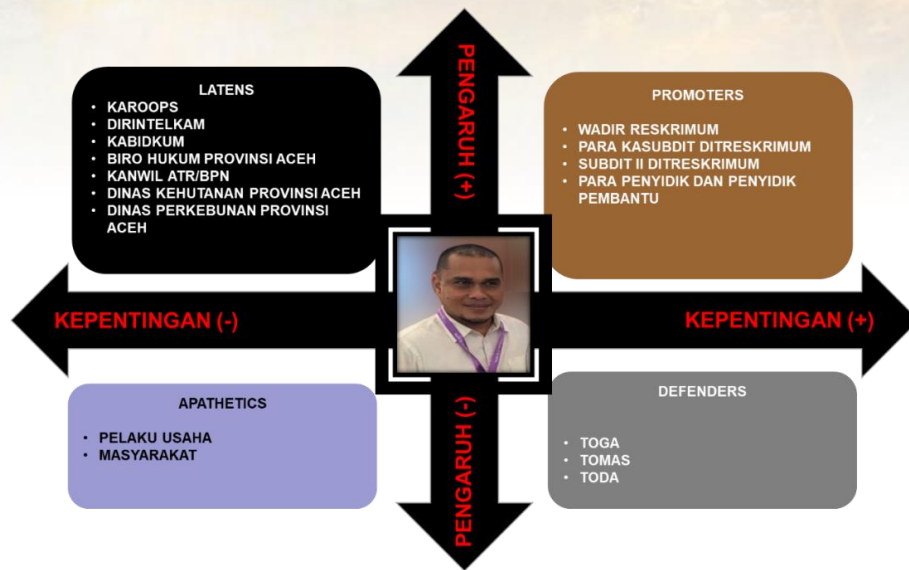


proyek perubahan yang digagas oleh Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Aceh merupakan sebuah formula yang efektif untuk mencegah, menimialisir serta menyelesaikan sengketa/konflik pertnahan yang erjadi di Aceh.

C. Implementasi Strategi Marketing

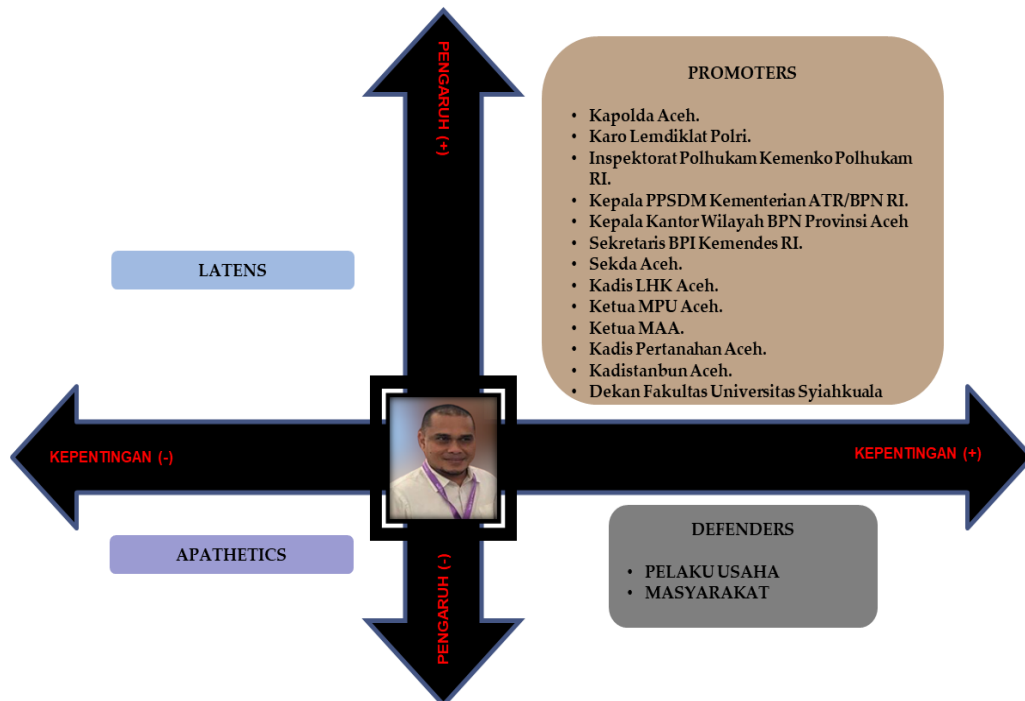
a. Dukungan stakeholders

Dukungan stakeholder sebelum proyek perubahan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Dukungan Stakeholder Sebelum Pelaksanaan Proyek Perubahan

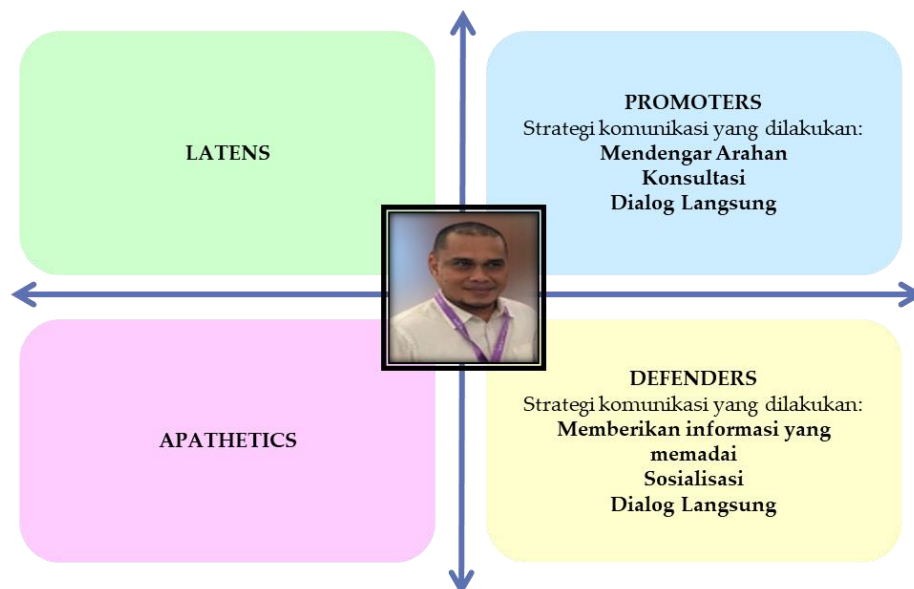
Sedangkan pada pelaksanaan proyek perubahan dukungan stakeholder dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Dukungan Stakeholder Sesudah Pelaksanaan Proyek Perubahan

b. Strategi Komunikasi Stakeholders

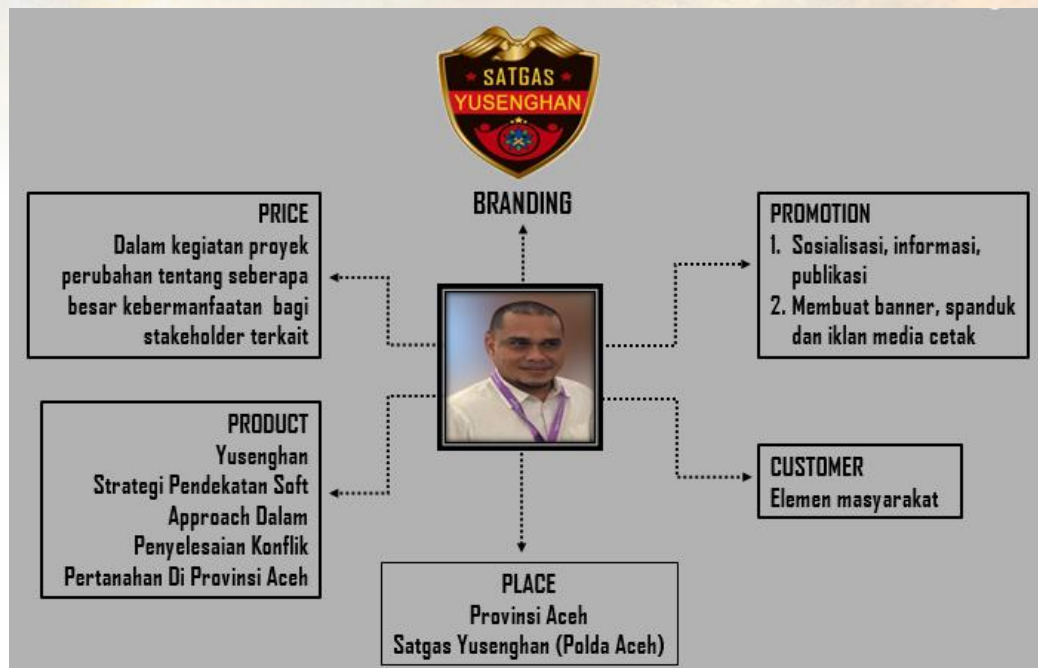
Keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan YUSENGHAN, STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH, membutuhkan adanya dukungan dari berbagai stakeholder yang telah dipetakan, masing-masing stakeholder memiliki karakteristik kepentingan dan pengaruh. karena itu dibutuhkan strategi komunikasi melalui pendekatan dialog strategis yang efektif kepada masing-masing stakeholder proyek perubahan, adapun strategi komunikasi yang diterapkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Strategi Komunikasi

c. Strategi Marketing

Implementasi strategi marketing yang diterapkan pada proyek perubahan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.4 Strategi Marketing

Deskripsi brand proyek perubahan sebagai berikut:

*** MAKNA LOGO ***

1. RENCONG → MELAMBANGKAN POLDA ACEH
2. SAYAP → MELAMBANGKAN KECEPATAN, KETANGKASAN DAN KESIGAPAN DALAM MENANGGAPI KASUS
3. BINTANG → MELAMBANGKAN KEAHLIAN DALAM BIDANG
4. ILUSTRASI → MELAMBANGKAN ILUSTRASI DUA BELAH PIHAK YANG BERSENGKETA

*** PEMILIHAN WARNA ***

1. MERAH BERARTI BERANI DAN TEGAS
2. COKLAT MELAMBANGKAN TANAH
3. KUNING MELAMBANGKAN KESUKSESAN DAN KEJAYAAN

d. Diseminasi dan Publikasi Proyek Perubahan

Desiminasi dan publikasi terhadap proyek perubahan yang dilakukan oleh project leader yaitu melalui pelaksanaan mobilisasi stakeholder, FGD, sosialisasi dan mempersiapkan sarana prasarana sekretariat satgas Yusenghan yang bertempat di Polda Aceh.



Selain itu sebagai upaya penerapan dan pelaksanaan proyek perubahan strategi pendekatan soft approach dalam penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi Aceh, di penghujung bulan oktober melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

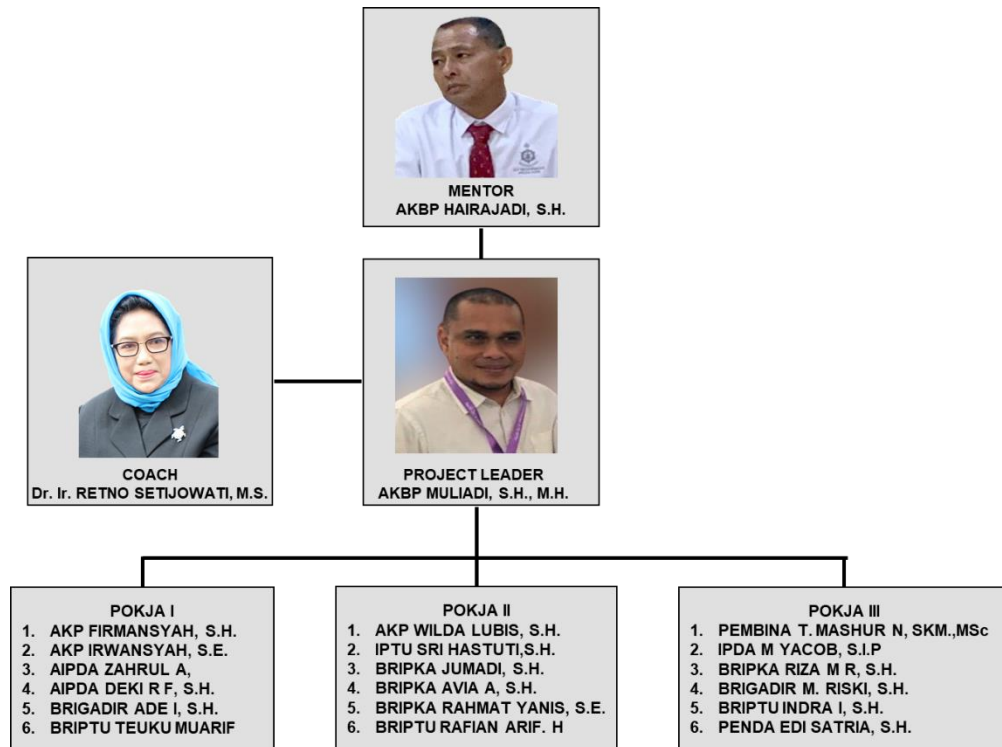
1. Penyelesaian sengketa lahan dengan Restorative Justice yang terjadi di Desa Puuk Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar yang merupakan Proyek Strategis nasional (PSN). yang mana sengketa tersebut terjadi antara Warga Desa Puuk dengan PT. Hutama Karya, sebagai Pelaksana pembangunan Proyek Jalan Tol Ruas Sigli - Banda Aceh.
2. Penyelesaian sengketa lahan dengan Restorative Justice yang terjadi di Desa Napai Kec. Woyla barat Kab. Aceh Barat antara PT. PAAL (PT. Prima Agro Aceh Lestari) dengan Koprasi Produsen Jaya Beusare dengan Luas lahan 121,24 Hektar.
3. Penyelesaian sengketa lahan dengan Restorative Justice yang terjadi di Desa Suyo Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie yang merupakan Proyek Strategis nasional (PSN). yang mana sengketa tersebut terjadi antara Sdri. Tamimah dengan PT. Hutama Karya sebagai Pelaksana pembangunan Proyek Jalan Tol Ruas Sigli - Banda Aceh.

4. Pengecekan tkp sengketa lahan di PSN (Proyek Strategis nasional) pada jalan tol sibanceh.
5. Pengecekan tkp sengketa lahan di areal kebun sawit
6. Pengecekan tkp sengketa lahan di PSN (jalan tol sibanceh) yg dipagar oleh masyarakat
7. Mediasi sengketa lahan yg melibatkan perangkat desa



e. Pemanfaatan sumber daya organisasi

Dalam proyek perubahan, kegiatan ini harus di tata dan di kelola dengan baik, untuk itu pemanfaatan sumber daya organisasi yang merupakan bagian dari tim efektif sangatlah penting. Adapun pemanfaatan sumber daya organisasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.5 Struktur Tim Efektif

Struktur tim efektif memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing, diantaranya sebagai berikut :

1) Mentor

- Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas project leader secara profesional serta berperan sebagai inspirator
- Memberikan dukungan penuh dalam merancang dan melaksanakan proyek perubahan
- Memberikan bimbingan dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses pelaksanaan proyek perubahan



2) Coach

- Memberikan motivasi, arahan dan bimbingan dalam menyusun dan melaksanakan proyek perubahan
- Melakukan monitoring dan komunikasi kepada peserta selama tahap taking ownership dan selama tahap laporan kepemimpinan baik secara langsung maupun via media elektronik.
- Memberikan masukan kepada peserta terkait pelaksanaan proyek perubahan serta permasalahan yang timbul sebatas kewenangan coach.

3) Project Leader

- Mempersiapkan dokumen dan rencana jadwal proyek perubahan
- Melakukan diskusi pelaksanaan proyek perubahan secara aktif dengan mentor dan coach serta mengikuti arahan dan masukan
- Melakukan komunikasi dengan stakeholder
- Melaksanakan tahapan proyek perubahan
- Membuat laporan pelaksanaan proyek perubahan kepada penyelenggaraan

4) Tim Efektif

- 1) Membantu penyusunan proyek perubahan sebagai tenaga teknis pendukung pelaksanaan proyek perubahan
- 2) Membantu penyusunan proyek perubahan sebagai tenaga administrasi pendukung pelaksanaan proyek perubahan.
- 3) Membantu pelaksanaan proyek perubahan sebagai stakeholder eksternal dalam penyelesaian konflik bidang pertanahan

D. Keberlanjutan Proyek Perubahan

a. Dukungan Mentor untuk keberlanjutan Proyek Perubahan

Adapun dukungan keberlanjutan proyek perubahan akan ditindaklanjuti pada rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang.

b. Rencana implementasi jangka menengah dan jangka panjang

Tabel 2.2 Tahapan Perubahan Rencana Srategis (6 Bulan)

No.	Tahapan	Waktu	Output	Penanggung jawab	Bukti kelengkapan
1.	Pemutahiran Data Alas Hak Atas Tanah Non Sertipikat	November 2022 s.d Januari 2023	Tersusunnya data	Project Laeder Tim Efektif	Data Alas Hak Atas Tanah Non Sertipikat
3.	Pengesahan SOP dan SK Gubernur Tentang Pembentukan Satgas Yusenghan	Januari 2023	Tersusunnya SOP penanganan kasus Yusenghan	Mentor Project Leader Tim Efektif	SK Gubernur
4.	Pelaksanaan MoU Dengan Stakeholder	Februari 2023	Penanda tangan kerjasama	Mentor Project Laeder Tim Efektif Stakeholder	Dokumentasi Naskah kerjasama
5.	Penyusunan draft Qanun (Perda) Tentang Satgas Yusenghan	Maret 2023	Tersusunnya draft Qanun (Perda) Tentang Satgas Yusenghan	Mentor Project Laeder Tim Efektif Stakeholder	Draft Qanun (Perda)
6.	Penerapan pendekatan soft approach	Maret s.d April 2023	Efektifitas pendekatan soft approach	Project Laeder Tim Efektif Satgas Terpadu	Dokumentasi Notulensi
7.	Monitoring dan Evaluasi	April 2023	Perbaikan	Mentor Project Laeder Tim Efektif	Notulensi

Tabel 2.3 Tahapan Perubahan Rencana Srategis (12 Bulan)

No.	Tahapan	Waktu	Output	Penanggung jawab	Bukti kelengkapan
1.	Pengesahan Qanun (Perda) Tentang Satgas Yusenghan	Mei 2023 s.d Februari 2024	Tersedian Kebijakan Strategis	Mentor Project Laeder Tim Efektif Stakeholder	Qanun (Perda) Tentang Satgas Yusenghan



2.	Implementasi Penyelesaian konflik pertanahan berkelanjutan	Juni 2023 s.d Maret 2024	Efektifitas pendekatan soft approach Penyelesaian konflik	Project Laeder Tim Efektif Satgas terpadu	Laporan
3.	Monitoring dan evaluasi	April 2024	Perbaikan	Mentor Project Laeder Tim Efektif	Notulensi

E. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran

Dalam Implementasi Proyek Perubahan terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam proses pemberdayaan organisasi pembelajar, yaitu:

a. Pengembangan Organisasi Pembelajar (Individu)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini perlu disadari, karena manusia merupakan subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk menjadi manusia yang benar-benar mampu dan memiliki etos kerja produktif, trampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan, menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara No 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Sipil Negara telah mengamanatkan pentingnya Pengembangan Kompetensi ASN.

Untuk dapat meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan harus diarahkan kepada upaya:



1. Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dan tanah air;
2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan atau kepemimpinan;
3. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan bertanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Agar tercapainya sasaran pengembangan kompetensi sesuai dengan tujuan yang diharapkan, terkait keikutserta pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII yang diselenggarakan Lemdiklat Pusdikmin Polri bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara, sebagai wujud dari pemberdayaan organisasi pembelajar individu, telah mengikuti :

1. Pelatihan Membangun kerjasama yang strategis dengan Instansi Lain untuk Menuju Polri yang Presisi pada 28 Agustus 2022 yang diselenggarakan Jogja Smart Indotama.

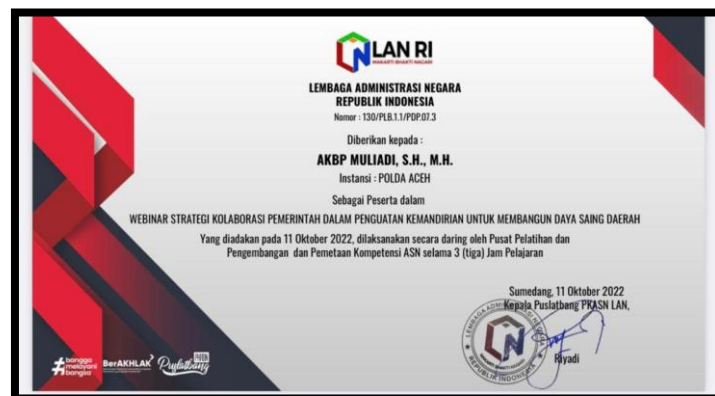


2. Workshop Konseptuallisasi dan Penyusunan Indeks Profesionalitas Anggota Polri pada tanggal 31 Agustus s.d 2

September 2022 yang diselenggarakan Bidang Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia.



3. Webinar strategi kolaborasi pemerintah dalam penguatan kemandirian untuk membangun daya saing daerah pada tanggal 11 Oktober 2022 yang diselenggarakan oleh Puslatbang PKASN.



b. Pengembangan Organisasi Pembelajar (Organisasi)

Perbaikan secara terus menerus atau continuous improvement telah menjadi tuntutan bagi setiap organisasi saat ini. Berbagai organisasi berusaha memperbaiki diri agar tidak tertinggal dengan perkembangan dunia yang semakin maju dan mengglobal. Hal ini harus menjadi perhatian bagi sebuah organisasi, gaya organisasi perintah atau komando menjadi sharing atau partisipatif. Organisasi harus memberikan



kesempatan bagi anggotanya untuk selalu belajar dan berkembang sehingga dapat memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah mengembangkan learning organization.

Learning Organization atau organisasi pembelajar pertama kali dipopulerkan oleh Peter Senge dalam bukunya *The Fifth Discipline* (1990). Menurut Senge, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengembangkan institusinya menjadi organisasi pembelajar. Di dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa organisasi pembelajar merupakan wadah bagi orang-orang yang terus menerus meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang benar-benar diharapkan. Idealnya di dalam organisasi pembelajar, setiap individu mampu mengembangkan berbagai pemikiran barunya, bebas menyampaikan aspirasinya, dan bagaimana masing-masing individu terus belajar bagaimana belajar bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Senge menyarankan penggunaan 5 komponen teknologi, yaitu: pemikiran sistem, penguasaan pribadi, model mental, visi bersama dan pembelajaran tim.

Adapun bentuk pengembangan organisasi pembelajar, pada proyek perubahan, sebagai berikut:

1. Menyamakan persepsi, pemahaman kepada Personil, stakeholder internal dan eksternal bahwa proyek perubahan yang dilakukan sangat penting dalam upaya penanganan sengketa/konflik pertanahan di Aceh.



2. Melakukan koordinasi, asistensi, sinergi, kolaborasi dan pendampingan terus menerus dengan stakeholder lain, baik pemerintah pusat dan daerah, untuk mendapatkan dukungan.



3. Transfer Knowledge, dalam proses mencapai tujuan bersama, setiap anggota tim efektif baiknya memiliki pemahaman yang sama akan situasi, kondisi dan informasi yang terjadi dalam tim sehingga tidak ada yang tertinggal dan dapat maju bersama.



4. Mentoring, dalam mempelajari hal baru, tentu masih butuh orang lain untuk mendapat arahan saat kita bertemu masalah dan belum tahu jalan keluarnya. Selain itu, dalam proses mempelajari hal baru kita hendaknya mau mendengarkan



saran dan masukan orang lain seperti dalam sesi koordinasi, konsultasi bahkan dalam upaya memobilisasi stakeholder.

F. Pemanfaatan mata pelatihan pilihan untuk implementasi Proyek Perubahan

a. Manajemen Pemerintah

Manajemen Pemerintahan Konteks bernegara, setiap organisasi apapun itu bentuknya harus memiliki visi dan misi yang harus sejalan dengan tujuan nasional, yaitu selalu mengarahkan pada peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia agar makin maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Salah satu tantangan dalam menghadapi perkembangan jaman saat ini adalah bagaimana mensikapi era kemajuan yang serba canggih dan selalu berubah yang lebih dikenal dengan VUCA word.

VUCA yang merupakan singkatan dari Volatile (bergejolak), Uncertain (tidak pasti), Complex (kompleks), dan Ambigüe (tidak jelas) merupakan gambaran situasi di dunia bisnis di masa kini yang berimbas pada manajemen pemerintahan, Volatility berarti sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi dan politik. Uncertainty bermakna sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Complexity adalah adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi. Ambiguity didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasan masih dipertanyakan, Bob Johansen, dari Institute for the Future, mengadaptasi VUCA untuk dunia bisnis dalam bukunya tahun



2009, Leaders Make the Future. Ia mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman VUCA, yang disebut VUCA Prime, yaitu Vision (buatlah visi yang jelas), Understanding (Pahami situasi), Clarity (Komunikasi dan kolaborasi), Agility (Lincah Mengelola organisasi).

UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu; Partisipatif, Transparan, Responsif, Tidak Diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, Aksesibel, Akuntabel, berkeadilan mengamanatkan agar organisasi pemerintah terus berbenah dan melakukan inovasi di berbagai sektor publik, untuk beradaptasi dengan zaman. Seringkali para aparatur pemerintah melakukan maladministrasi, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam menerapkan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karenanya, para aparatur pemerintah perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam hal mengelola organisasi, salah satunya tentang bagaimana berkolaborasi dengan stakeholder untuk mencapai tujuan. Selain itu para aparatur dituntut untuk mampu menyusun perencanaan hingga evaluasi yang beradaptasi dengan perkembangan jaman di era digital ini.

Untuk mengurangi angka kejadian maladministrasi di dalam manajemen pemerintahan harus direncanakan manajemen sebaik-baiknya dengan menerapkan fungsi pokok manajemen yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (penggerakan), Controlling (pengawasan). Sebagai pemimpin agile harus mampu memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, mampu melakukan kolaborasi, bersinergi serta memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.



Aplikasi manajemen pemerintah dalam proyek perubahan antara lain melalui koordinasi dan mobilisasi stakeholder eksternal antara lain Kapolda Aceh, Karo Lemdiklat Polri, Inspektorat Polhukam Kemenko Polhukam RI, Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Sekretaris BPI Kemendes RI, Sekda Aceh, Kadis LHK Aceh, Ketua MPU Aceh, Ketua MAA, Kadis Pertanahan Aceh, Kadistanbun Aceh, dan Dekan Fakultas Universitas Syiahkuala.

b. Anti Korupsi

Integritas merupakan sebuah tolok ukur fundamental untuk kepemimpinan dalam mencegah anti korupsi. Dengan demikian seorang pemimpin harus memimpin dengan integritas, kejujuran dan berpegang pada nilai-nilai organisasinya. Kepemimpinan yang konsisten menunjukkan keteladanan dalam mempengaruhi orang lain berarti memberikan daya dorong untuk memotivasi dirinya dalam membangun integritas, yang secara tak langsung mendorong orang lain untuk memahami secara mendalam prinsip dalam menumbuhkembangkan integritas yang kita sebut dengan prinsip pertama adalah menumbuh kembangkan kepercayaan dan keyakinan dalam merubah kesadaran inderawi ke tingkat yang lebih baik; prinsip kedua adalah memberi saling menghormati dan menghargai orang lain; prinsip ketiga adalah memiliki kemampuan dalam kedewasaan rohaniah, sosial, emosional dan intelektual.

Integritas kepemimpinan merupakan salah satu atribut terpenting/kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas merupakan suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran,



prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Dalam kata integritas terkandung suatu komitmen mendalam terhadap hal yang benar, alasan yang benar, tidak peduli pada situasi-kondisi yang dihadapi oleh sang pemimpin. Adapun Instrumen dalam membangun Integritas antara lain: 1) Rule Based; 2) Value based; 3) Culture based dan 4) Instrumen dalam Birokrasi. Orang yang hidup dengan integritas itu tidak korup dan tidak akan mau dan mampu untuk mematahkan kepercayaan dari mereka yang menaruh kepercayaan kepada dirinya sebagai seorang pemimpin.

Dengan adanya satgas yusenghan dalam proyek perubahan maka perkara-perkara yang dilaporkan oleh masyarakat akan diselesaikan dengan restorative justice sehingga dapat meminimalisir dan mencegah perilaku anggota yang korup.

c. Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Disamping perencanaan, yang tidak kalah penting dalam pembangunan daerah adalah penganggaran pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran adalah dua hal yang harus saling mendukung dan sinkron. Perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan



alokasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan jelas. Ini menandakan bahwa dalam penganggaran daerah, paradigma penilaian kinerja perangkat daerah menjadi satu dimensi utama untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran publik, termasuk proses perencanaan anggaran pada tingkat PD yang diberi kewenangan untuk melakukan alokasi penganggaran.

Dengan ada satgas yusenghan dapat mendukung pembangunan nasional. Misalnya ada sengketa di area pembangunan jalan tol. Melalui peran satgas, maka permasalahan tanah di jalan tol (konflik di bidang pertanahan) dapat diselesaikan sehingga dapat mendukung pembangunan nasional.

G. Lesson Learn

Terdapat banyak pembelajaran yang amat berharga dalam pelaksanaan Proyek Perubahan ini, diantaranya adalah;

- a. Sebagai seorang pemimpin strategis unit kerja organisasi di dalam merumuskan sebuah gagasan/ide inovasi harus senantiasa melakukan koordinasi, diskusi dan audiensi, baik melalui forum diskusi kecil, (Focus Grup Discussion), atau melalui rapat kerja dengan semua stakeholder terkait, untuk mendengarkan ide atau saran masukan dari semua level dari atas sampai bawah, hal ini tentunya akan melahirkan sebuah gagasan/ide yang akan didukung oleh semua stakeholder terkait dalam implementasinya.
- b. Menanamkan integritas kepemimpinan yang tinggi pada setiap program yang telah direncanakan merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai target secara optimal, sesuai dengan timeline yang telah dibuat.





- c. Dibutuhkan komitmen yang kuat, dan tanggung jawab bersama untuk menjaga agar setiap tahapan proyek perubahan ini berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, hal ini dirasa dapat meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.
- d. Kolaborasi, koordinasi dan komunikasi efektif antar unsur Pentahelix terkait (Stakeholder Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat) merupakan salah satu kunci keberhasilan di dalam melakukan sebuah Inovasi dalam sebuah organisasi, sehingga banyak hal menjadi lebih mudah, bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.





BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan tahapan strategis jangka pendek (2 bulan) yang telah dilaksanakan per September sampai dengan November 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terbentuknya tim efektif
- b. Terlaksananya penyusunan draft sop dan draft sk gubernur tentang pembentukan satgas yusenghan
- c. Terlaksananya dukungan dan mobilisasi stakeholder
- d. Terlaksananya sosialisasi giat
- e. Terlaksananya penyusunan draft mou
- f. Monitoring dan evaluasi

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan proyek perubahan ini, maka saran dalam upaya tindak lanjut keberhasilan dari proyek perubahan sebagai berikut :

- a. Dibutuhkan konsistensi dukungan stakeholder terkait agar kegiatan proyek perubahan ini dapat berkelanjutan sesuai dengan harapan.
- b. Dibutuhkan masukan pemikiran atas langkah strategis dan teknis yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan proyek perubahan jangka menengah dan jangka panjang.





LAMPIRAN 1 PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF

**LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
YUSENGHAN
STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH**



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022**



SPRINT TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 760/VIII/DIK.2.5/2022

Perimbangan: Bahwa dalam rangka untuk mendukung Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4189/D.4/PDP.07.01 tanggal 13 Juli 2022 Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022;
 3. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VIII/DIK.2.5/2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP, JABATAN DAN KESATUAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai Tim Efektif dalam Rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh;
 2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2022 s.d adanya perubahan;
 3. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Agustus 2022



- Tembusan :
1. Kapolda Aceh.
 2. Invasda Polda Aceh.
 3. Sekretaris Daerah Aceh.
 4. Kakanwil BPN Provinsi Aceh.
 5. Kabidpropam Polda Aceh.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KAPOLDA ACEH
NOMOR : SPRIN/ 760/VIII/DIK.2.5/2022
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2022

DAFTAR NAMA PERSONEL TIM EFEKTIF PELAKSANAAN PROGRAM PERUBAHAN PESERTA PKN TINGKAT II T.A. 2022 DI LINGKUNGAN DITRESKRIMUM POLDA ACEH

No	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	KEY
1.	MULIADI, S.H., M.H.	AKBP/73050646	KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM	PROJECT LEADER
2.	FIRMANSYAH, S.Sos.	AKP/65110078	KANIT 1 SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	KATIM POKJA I
3.	IRWANSYAH, S.E.	AKP/77100234	KANIT 3 SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	AGT
4.	ZAHRI R AFWADI	AIPDA/80090353	BANIT SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	AGT
5.	DEKI R FAHLEVI, S.H.	AIPDA/85120190	BANIT SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	AGT
6.	ADE ICHWAN, S.H.	BRIGADIR/90030337	BANIT SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	AGT
7.	TEUKU MUARIF	BRIPTU/98050189	BANIT SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	AGT
8.	WILDA LUBIS, S.H.	AKP/77060384	KANIT 2 SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	KATIM POKJA II
9.	SRI HASTUTI S.H.	IPTU/84110223	PANIT 4 SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	AGT
10.	JUMADI S.H.	BRIPKA/86051211	BANIT SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	AGT
11.	AVIA AL QAUTSAR, S.H.	BRIPKA/83061398	BANIT SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	AGT
12.	RAHMAT YANIS, S.E.	BRIPKA/88010038	BANIT SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	AGT
13.	RAFIAN ARIF, H.	BRIPTU/98030206	BANIT SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	AGT
14.	TEUKU MANSHUR NASNI, SKM., M.Sc (Med)	PEMBINA/197201051994031003	PENGELOLA BANTUAN HUKUM PADA BIRO HUKUM SETDA ACEH	KATIM POKJA III
15.	UMARANI AZKHA, S.H., M.H.	PENATA MUDA/196209202018011001	ANALIS HUKUM PERTANAHAN KANWIL BPN PROVINSI ACEH	AGT
16.	GIFFARI ZAKAWALI, S.Tr.IP	PENATA MUDA/199914062021081002	STAF BIRO HUKUM SETDA ACEH	AGT
17.	MUHD. YACOB, S.I.P.	IPDA/82051392	PANIT 5 SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	AGT
18.	RIZA M. RIZKI, S.H.	BRIPKA/86061473	BANIT SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	AGT
29.	RISKI RAMADHAN, S.H.	BRIGADIR/91040170	BANIT SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	AGT
20.	INDRA ISMAWAN	BRIPDA/96081351	BANIT SUBDIT 2 DITRESKRIMUM	AGT

Dikeluarkan di: Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Agustus 2022



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

NOTA - DINAS

Nomor : BND- 192 /VIII/DIK.2.5./2022/Subdt 2 - Resum

Kepada : 1. Yth. Para Kanit Subdt 2 Ditreskrimum;
2. Yth. Para Panit Subdt 2 Ditreskrimum.
Dan : Kasubdt 2 Ditreskrimum.
Perihal : Rapat Internal Tim Efektif Program Perubahan
PKN Tk. II Angkatan XVIII T.A. 2022.

1. Rujukan:

- Surat Depati Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4189/D.4/PDP 07.01 tanggal 13 Juli 2022 Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VIII/DK.2.5/2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.
- Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VIII/DK.2.5/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam Rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung Pelaksanaan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada:

- Hari / Tanggal : Senin / 22 Agustus 2022;
- Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;
- Tempat : Ruang Kerja Kasubdt 2 Ditreskrimum Polda Aceh;
- Acara : Rapat Koordinasi Tim efektif dalam rangka Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan Peserta PKN Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Banda Aceh, 19 Agustus 2022
KASUBDT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH

MULIADI, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 73050646

Tembusan :

- Kapolda Aceh.
- Invasda Polda Aceh.
- Ditreskrimum Polda Aceh.
- Kabidpropam Polda Aceh.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

NOTULEN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RAPAT INTERNAL TIM EFEKTIF
PROGRAM PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVIII
T.A. 2022 DI LINGKUNGAN DITRESKRIMUM POLDA ACEH

Hari / Tanggal : Senin / 22 Agustus 2022
Pukul : 09.00 WIB s.d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kasubdt 2 Ditreskrimum Polda Aceh
Pimpinan Rapat : Kasubdt 2 Ditreskrimum Polda Aceh (Project Leader)
Peserta : 1. Kanit 1 Subdt 2 Ditreskrimum Polda Aceh
2. Kanit 2 Subdt 2 Ditreskrimum Polda Aceh
3. Kanit 3 Subdt 2 Ditreskrimum Polda Aceh
4. Panit 4 Subdt 2 Ditreskrimum Polda Aceh
5. Panit 5 Subdt 2 Ditreskrimum Polda Aceh

Materi rapat :

- Pembahasan tentang:
 - Persiapan awal Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh.
 - Rancangan Proyek Perubahan dalam rangka mengantisipasi potensi konflik / sengketa bidang Pertanahan di Provinsi Aceh.
 - Pemaparan Rancangan Proyek Perubahan yang berjudul Yusengahan (Yustisi Sengketa Lahan) sebagai salah satu Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Aceh oleh Kasubdt 2 Ditreskrimum Polda Aceh (Project Leader)

1. Pelaksanaan

- Pembukaan Rapat oleh Pimpinan Rapat AKBP MULIADI, S.H., M.H. dilanjutkan dengan penyampaian materi rapat dan Pemaparan Rancangan Proyek Perubahan dengan rincian sebagai berikut:
 - Proyek perubahan merupakan ide/gagasan yang harus diimplementasikan sehingga menjadi inovasi.
 - Agar peran aktif dari seluruh personel Ditreskrimum Polda Aceh khususnya personel yang terlibat sebagai Tim Efektif Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh.
 - Tim Efektif yang telah disusun sesuai Pola agar mengidentifikasi dan menginventarisir konflik / sengketa bidang Pertanahan di Provinsi Aceh sesuai dengan Laporan Polisi yang diangikan oleh masing unit sehingga dapat dirangkum menjadi rumusan permasalahan yang akan diuangkan dalam konsep Rancangan Proyek perubahan.
 - Rancangan Proyek perubahan ini merupakan sebuah pemikiran sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan publik Subdt II Ditreskrimum Polda Aceh, yang diharapkan dapat menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

a. pembentukan

-2-

- penyusunan Rancangan Proyek Perubahan yang berjudul Yusengahan (Yustisi Sengketa Lahan) sebagai salah satu Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Aceh.
- Pembentukan Satgas Yusengahan merupakan Pelaksanaan kewenangan penanganan konflik/sengketa yang dilaksanakan secara terkoordinasi, berenergi serta sebagai narasumber antar stakeholder yang sangat responsif dan terbuka sehingga dapat mencegah, meminimalisir serta menyelesaikan sengketa/konflik pertanahan yang terjadi di Aceh dengan melibatkan instansi terkait secara terpadu. Tim ini antara lain bertugas menginventarisasi / pendataan alas hak atas tanah non sertifikat, melakukan penyusunan pemetaan konflik pertanahan yang terjadi, melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik, mencegah meluasnya eskalasi konflik dan melakukan penegakkan hukum secara Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Aceh.
- Untuk keberhasilan Proyek perubahan ini dibutuhkan dukungan dan komitmen Tim Efektif untuk berperan aktif dalam memberikan masukan dan sarannya. Serta perlu dilakukan Rapat Koordinasi lanjutan dengan melibatkan stakeholder lainnya.

2. Kesimpulan

- Agar peran aktif dari seluruh personel Ditreskrimum Polda Aceh khususnya personel yang terlibat sebagai Tim Efektif untuk kesuksesan Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh.
- Proyek Perubahan yang digagas oleh Kasubdt 2 Ditreskrimum Polda Aceh merupakan sebuah formula yang efektif untuk mencegah, meminimalisir serta menyelesaikan sengketa/konflik pertanahan yang terjadi di Aceh.
- Pelibatan Stakeholder dari instansi terkait secara terpadu dalam Pembentukan Satgas Yusengahan (Yustisi Sengketa Lahan).
- Pembentukan Satgas Yusengahan merupakan Pelaksanaan kewenangan penanganan konflik/sengketa yang dilaksanakan secara terkoordinasi, berenergi serta sebagai narasumber antar stakeholder yang sangat responsif dan terbuka.
- Akan dilakukan Rapat Koordinasi lanjutan dengan melibatkan Stakeholder dari Pemprov Aceh (Biro Hukum Setda Aceh) dan Kamwil BPN Provinsi Aceh.

3. Demikian Notulen Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Internal Tim Efektif Program Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh dibuat sebagai bahan masukan pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Pimpinan Rapat
KASUBDT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH
MULIADI, S.H., M.H.
AKBP NRP 73050646

Banda Aceh, 22 Agustus 2022
NOTULEN
MUHAMMAD YACOB, S.I.P
IPDA NRP 82051382



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022



DOKUMENTASI PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022



UNDANGAN TIM EKSTERNAL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL UMUM

Nomor : B/ 624 /VII/DK.2.5/2022/resum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Undangan

Banda Aceh, 25 Agustus 2022

Kepada
Yth: **Sdr. UMARANI AZKHA, S.H., M.H.**
(STAF KANWIL BPN PROVINSI ACEH)

di
Banda Aceh

1. Rujukan:
a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Depati Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4189D.4/POP.07.01 tanggal 13 Juli 2022 Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
c. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VII/DK.2.5/2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 Perintah Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.
d. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VIII/DK.2.5/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mendukung Pelaksanaan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada:
a. Hari / Tanggal : Senin / 29 Agustus 2022;
b. Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;
c. Tempat : Ruang Kerja Kasubdit 2 Ditreskrim Polda Aceh;
d. Acara : Rapat Koordinasi Tim efektif dalam rangka Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan yang berjudul "Yusengahan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanian di Provinsi Aceh".

3. Demikian untuk menjadi maklum atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Pj Gubernur Aceh.
2. Kapolda Aceh.
3. Inwada Polda Aceh.
4. Sekretaris Daerah Aceh.
5. Kakamwil BPN Provinsi Aceh.
6. Kabidpropam Polda Aceh.

DIREKTUR
UMARANI AZKHA, S.H., M.H.
KORPRIKAMSI BEKAS POLISI NRP 72110531

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL UMUM

Nomor : B/ 624 /VII/DK.2.5/2022/resum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Undangan

Banda Aceh, 25 Agustus 2022

Kepada
Yth: **Sdr. GIFFARI ZAKAWALI, S.T.I.P.**
(STAF SETDA ACEH)

di
Banda Aceh

1. Rujukan:
a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Depati Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4189D.4/POP.07.01 tanggal 13 Juli 2022 Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
c. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VII/DK.2.5/2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 Perintah Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.
d. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VIII/DK.2.5/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mendukung Pelaksanaan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada:
a. Hari / Tanggal : Senin / 29 Agustus 2022;
b. Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;
c. Tempat : Ruang Kerja Kasubdit 2 Ditreskrim Polda Aceh;
d. Acara : Rapat Koordinasi Tim efektif dalam rangka Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan yang berjudul "Yusengahan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanian di Provinsi Aceh".

3. Demikian untuk menjadi maklum atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Pj Gubernur Aceh.
2. Kapolda Aceh.
3. Inwada Polda Aceh.
4. Sekretaris Daerah Aceh.
5. Kakamwil BPN Provinsi Aceh.
6. Kabidpropam Polda Aceh.

DIREKTUR
UMARANI AZKHA, S.H., M.H.
KORPRIKAMSI BEKAS POLISI NRP 72110531

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL UMUM

Nomor : B/ 624 /VII/DK.2.5/2022/resum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Undangan

Banda Aceh, 25 Agustus 2022

Kepada
Yth: **Sdr. T. MANSHUR NASNI, SKM., M.Sc.**
(STAF BIRO HUKUM SETDA ACEH)

di
Banda Aceh

1. Rujukan:
a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Depati Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4189D.4/POP.07.01 tanggal 13 Juli 2022 Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
c. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VII/DK.2.5/2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 Perintah Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.
d. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VIII/DK.2.5/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mendukung Pelaksanaan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada:
a. Hari / Tanggal : Senin / 29 Agustus 2022;
b. Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;
c. Tempat : Ruang Kerja Kasubdit 2 Ditreskrim Polda Aceh;
d. Acara : Rapat Koordinasi Tim efektif dalam rangka Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan yang berjudul "Yusengahan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanian di Provinsi Aceh".

3. Demikian untuk menjadi maklum atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Pj Gubernur Aceh.
2. Kapolda Aceh.
3. Inwada Polda Aceh.
4. Sekretaris Daerah Aceh.
5. Kakamwil BPN Provinsi Aceh.
6. Kabidpropam Polda Aceh.

DIREKTUR
UMARANI AZKHA, S.H., M.H.
KORPRIKAMSI BEKAS POLISI NRP 72110531



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

**NOTULEN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RAPAT KORDINASI STAKEHOLDER TIM EFEKTIF
PROGRAM PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVIII
T.A. 2022 DI LINGKUNGAN DITRESKRIMUM POLDA ACEH**

Hari / Tanggal : Senin / 29 Agustus 2022
Pukul : 09.30 WIB s.d 13.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Aceh
Pimpinan Rapat : Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Aceh (Project Leader)
Peserta : 1. Pengelola Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda Aceh.
2. Analis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Aceh.
3. Staf Biro Hukum Setda Aceh.
Materi rapat : Pembahasan tentang
- Persiapan awal Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh.
- Pemaparan Rancangan Proyek Perubahan yang berjudul Yusenghan (Yustisi
Sengketa Lahan) sebagai salah satu Strategi Pendekatan Soft Approach
dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Aceh oleh Kasubdit 2
Ditreskrimum Polda Aceh (Project Leader)

1. Pelaksanaan

- Pembukaan Rapat oleh Pimpinan Rapat **AKBP MULIADI, S.H., M.H.** dilanjutkan dengan penyampaian materi rapat dan Pemaparan Rancangan Proyek Perubahan dengan rincian sebagai berikut :
 - Proyek perubahan merupakan ide/gagasan yang harus diimplementasikan sehingga menjadi inovasi.
 - Agar peran aktif dari seluruh stakeholder yang terlibat sebagai Tim Efektif Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh. Untuk keberhasilan Proyek perubahan ini dibutuhkan dukungan dan komitmen Tim Efektif untuk berperan aktif dalam memberikan masukan dan sarannya.
 - penyusunan Rancangan Proyek Perubahan yang berjudul Yusenghan (Yustisi Sengketa Lahan) sebagai salah satu Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Aceh.
 - Pembentukan Satgas Yusenghan merupakan Pelaksanaan kewenangan penanganan konflik/sengketa yang dilaksanakan secara terkoordinasi, bersinergi serta sebagai narahubung antar stakeholder yang sangat responsif dan terbuka sehingga dapat mencegah, meminimalisir serta menyelesaikan sengketa/konflik pertanahan yang terjadi di Aceh dengan melibatkan instansi terkait secara terpadu. Tim ini antara lain bertugas menginventarisasi / pendataan alas hak atas tanah non sertifikat, melakukan penyusunan pemetaan konflik pertanahan yang terjadi, melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik, merogah melusanya eskalasi konflik dan melakukan penegakan hukum secara Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Aceh.
 - Untuk mendukung Proyek perubahan ini sangat diperlukan beberapa dasar hukum yang harus dibuat antara lain: SK Gubernur tentang pembentukan Satgas Yusenghan (jangka menengah) dan adanya sebuah regulasi hukum di Provinsi Aceh (Oatun/Penda) yang mengatur tentang Penyelesaian Sengketa tanah/lahan. Oleh karena nya peranan Biro Hukum Setda Aceh dan Kanwil BPN Aceh sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan Proyek perubahan ini

b. Tanggapan

-2-

- Tanggapan Peserta Rapat kordinasi dari perwakilan Pemerintah Aceh, Bpk. **TEUKU MANSHUR NASNI, SKM., M.Sc (Med)** Jabatan Pengelola Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda Aceh, dengan rincian sebagai berikut :
 - Biro Hukum Setda Aceh mendukung Proyek perubahan ini dan akan memastikan konsep Surat Keputusan / peraturan yang dibuat sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.
 - Biro Hukum Setda Aceh akan menjadi narahubung bagi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 untuk memperoleh legal standing Pembentukan Satgas Yusenghan dengan Pemerintah Aceh.
- Tanggapan Peserta Rapat kordinasi dari perwakilan Kanwil BPN Provinsi Aceh, Bpk. **UMARANI AZKHA, S.H., M.H.**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Aceh;
 - Permasalahan pertanahan dilihat dari segi yuridisnya merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya, dibutuhkan persamaan persepsi antara stakeholder yang memiliki kewenangan merangani permasalahan sengketa tanah.
 - Rancangan Proyek Perubahan yang berjudul Yusenghan (Yustisi Sengketa Lahan) menjadi suatu wadah penyelesaian sengketa / Konflik Pertanahan di Provinsi Aceh dengan Pendekatan Soft Approach.
 - Mendukung sepenuhnya untuk implementasi Proyek Perubahan ini dan akan memfasilitasi kebutuhan data dan dokumen terkait kepemilikan Tanah yang telah bersertifikat dan akan menginisiasi pendataan alas hak atas tanah non sertifikat.
- Kesimpulan
 - Agar peran aktif dari seluruh Tim Efektif untuk kesuksesan Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh
 - Proyek Perubahan yang digagas oleh Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Aceh merupakan sebuah formula yang efektif untuk mencegah, meminimalisir serta menyelesaikan sengketa/konflik pertanahan yang terjadi di Aceh.
 - Peilaban Stakeholder dari Instansi terkait secara terpadu dalam Pembentukan Satgas Yusenghan (Yustisi Sengketa Lahan).
 - Pembentukan Satgas Yusenghan merupakan Pelaksanaan kewenangan penanganan konflik/sengketa yang dilaksanakan secara terkoordinasi, bersinergi serta sebagai narahubung antar stakeholder yang sangat responsif dan terbuka
 - Stakeholder dari Pemprov Aceh (Biro Hukum Setda Aceh) dan Kanwil BPN Provinsi Aceh mendukung sepenuhnya untuk implementasi Proyek Perubahan ini dan akan memfasilitasi kebutuhan data / dokumen serta legalitas terhadap proyek perubahan ini.
- Demikian Notulen Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Kordinasi Intas sektoral Tim Efektif Program Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 dibuat sebagai bahan masukan pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Pimpinan Rapat
KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH

Selaku
Project Leader

MULIADI, S.H., M.H.
AKBP NRP 73050646

Banda Aceh, 29 Agustus 2022

NOTULEN

MUHAMMAD YACOB, S.I.P.
IPDA NRP 82051392



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

**ABSENSI RAPAT KORDINASI TIM EFEKTIF DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PERUBAHAN PESERTA PKN TINGKAT II T.A. 2022
HARI SENIN TANGGAL 29 AGUSTUS 2022**

No	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	MULIADI, S.H., M.H.	AKBP/73050646	KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH	1.
2.	TEUKU MANSHUR NASNI, SKM., M.Sc (Med)	PEMBINA/ 197201051994031003	PENGELOLA BANTUAN HUKUM PADA BIRO HUKUM SETDA ACEH	2.
3.	UMARANI AZKHA, S.H., M.H.	PENDAH/ 199209202018011001	ANALIS HUKUM PERTANAHAN KANWIL BPN PROVINSI ACEH	3.
4.	GIFFARI ZAKAWALI, S.Tr. IP	PENDAH/ 199914062021081002	STAF BIRO HUKUM SETDA ACEH	4.
5.	MUHAMMAD YACOB, S. IP	IPDA/8201392	PANIT SUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH	5.

Banda Aceh, 29 Agustus 2022
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH

ADE HARIYANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110531



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022**

DOKUMENTASI





LAMPIRAN 2
PENYUSUNAN DRAFT SOP DAN DRAFT SK GUBERNUR
TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS YUSENGHAN

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
YUSENGHAN
STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH





UNDANGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM

Nomor : B/932 /IX/DK.2.5/2022/Resum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Banda Aceh, 18 September 2022

Kepada
Yh: **Sdr. T. MANSHUR NASMI, SKM, M.Sc.**
(STAF BIRO HUKUM SETDA ACEH)

di
Banda Aceh

1. Rujukan:
a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Keputusan Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4198/D.4/PP/07.01 tanggal 13 Juli 2022 Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;
c. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VI/DK.2.5/2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 Perintah Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022;
d. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VI/DK.2.5/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mendukung Pelaksanaan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada:
a. Hari / Tanggal : Senin / 19 September 2022;
b. Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;
c. Tempat : Ruang Kerja Kasubid 2 Ditreskrim Polda Aceh;
d. Acara : Rapat Penyusunan Draft Surat Keputusan Gubernur Aceh Pembentukan Satgas Yusenghan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Satgas Yusenghan.

3. Demikian untuk menjadi maklum atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH
ADE HARIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110531

Tembusan:
1. Kapolda Aceh;
2. Inwada Polda Aceh;
3. Sekertaris Daerah Aceh;
4. Kakanwil BPN Provinsi Aceh;
5. Kabidprogam Polda Aceh.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM

Nomor : B/932 /IX/DK.2.5/2022/Resum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Banda Aceh, 18 September 2022

Kepada
Yh: **Sdr. UMARANI AZKHA, S.H., M.H.**
(STAF KANWIL BPN PROVINSI ACEH)

di
Banda Aceh

1. Rujukan:
a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Keputusan Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4198/D.4/PP/07.01 tanggal 13 Juli 2022 Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;
c. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VI/DK.2.5/2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 Perintah Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022;
d. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VI/DK.2.5/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mendukung Pelaksanaan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada:
a. Hari / Tanggal : Senin / 19 September 2022;
b. Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;
c. Tempat : Ruang Kerja Kasubid 2 Ditreskrim Polda Aceh;
d. Acara : Rapat Penyusunan Draft Surat Keputusan Gubernur Aceh Pembentukan Satgas Yusenghan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Satgas Yusenghan.

3. Demikian untuk menjadi maklum atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH
ADE HARIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110531

Tembusan:
1. Kapolda Aceh;
2. Inwada Polda Aceh;
3. Sekertaris Daerah Aceh;
4. Kakanwil BPN Provinsi Aceh;
5. Kabidprogam Polda Aceh.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM

Nomor : B/932 /IX/DK.2.5/2022/Resum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Banda Aceh, 18 September 2022

Kepada
Yh: **KAPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**

di
Banda Aceh

1. Rujukan:
a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Keputusan Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4198/D.4/PP/07.01 tanggal 13 Juli 2022 Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;
c. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VI/DK.2.5/2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 Perintah Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022;
d. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VI/DK.2.5/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mendukung Pelaksanaan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada:
a. Hari / Tanggal : Senin / 19 September 2022;
b. Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;
c. Tempat : Ruang Kerja Kasubid 2 Ditreskrim Polda Aceh;
d. Acara : Rapat Penyusunan Draft Surat Keputusan Gubernur Aceh Pembentukan Satgas Yusenghan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Satgas Yusenghan.

3. Demikian untuk menjadi maklum atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH
ADE HARIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110531

Tembusan:
1. Kapolda Aceh;
2. Inwada Polda Aceh;
3. Sekertaris Daerah Aceh;
4. Kakanwil BPN Provinsi Aceh;
5. Kabidprogam Polda Aceh.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM

Nomor : B/932 /IX/DK.2.5/2022/Resum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Banda Aceh, 18 September 2022

Kepada
Yh: **KABIDKUM POLDA ACEH**

di
Banda Aceh

1. Rujukan:
a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Keputusan Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4198/D.4/PP/07.01 tanggal 13 Juli 2022 Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;
c. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VI/DK.2.5/2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 Perintah Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022;
d. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VI/DK.2.5/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mendukung Pelaksanaan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, agar karena KA dapat menghadirkan 1 (satu) personel biding penyusunan dan penyuluhan hukum untuk hadir pada:
a. Hari / Tanggal : Senin / 19 September 2022;
b. Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;
c. Tempat : Ruang Kerja Kasubid 2 Ditreskrim Polda Aceh;
d. Acara : Rapat Penyusunan Draft Surat Keputusan Gubernur Aceh Pembentukan Satgas Yusenghan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Satgas Yusenghan.

3. Demikian untuk menjadi maklum atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH
ADE HARIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110531

Tembusan:
1. Kapolda Aceh;
2. Inwada Polda Aceh;
3. Karcas Polda Aceh;
4. Kero SDM Polda Aceh;
5. Kabidprogam Polda Aceh.



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM

NOTULEN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RAPAT PENYUSUNAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH PEMBENTUKAN SATGAS YUSENGHAN DAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS SATGAS YUSENGHAN.

Hari / Tanggal : Senin / 19 September 2022;
Pukul : 09.00 wib s.d 14.00 wib
Tempat : Ruang Kerja Kasubdit 2 Ditreskrim Polda Aceh
Pimpinan Rapat : Kasubdit 2 Ditreskrim Polda Aceh (Project Leader)
Peserta : 1. Paur II Subbid Sunluhuk Bidum Polda Aceh.
2. Pengelola Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda Aceh.
3. Analis Hukum Perencanaan Kanwil BPN Provinsi Aceh.
4. Staf Subbag Program Monev Data Dan Informasi Ditandun Aceh.
Materi rapat : Penyusunan Draft Surat Keputusan Gubernur Aceh Pembentukan Satgas Yusenghan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Satgas Yusenghan.

1. Dasar:

- Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4189/D-4/PDP/07/01 tanggal 13 Juli 2022, tentang Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka dipandang perlu mengorganisir Surat Perintah ini.
- Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/805/VI/DIK/2.5/2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022, perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.
- Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VIII/DIK/2.5/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam Rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh;
- Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Nomor: B/89/IX/DIK/2.5/2022/kesum tanggal 15 September 2022 perihal Undangan Rapat Penyusunan Draft Surat Keputusan Gubernur Aceh Pembentukan Satgas Yusenghan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Satgas Yusenghan.
- Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Nomor: B/89/IX/DIK/2.5/2022/kesum tanggal 15 September 2022 perihal Undangan Rapat Penyusunan Draft Surat Keputusan Gubernur Aceh Pembentukan Satgas Yusenghan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Satgas Yusenghan.

2. Pelaksanaan....

-2-

2. Pelaksanaan

- Pembukaan Rapat oleh Pimpinan Rapat AKBP MULIADI, S.H., M.H. selaku Project Leader diayunkan dengan penyampaian materi rapat dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembentukan Satgas Yusenghan merupakan Proyek perubahan yang digagas oleh Kasubdit 2 Ditreskrim Polda Aceh selaku Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.
 - Diharapkan Proyek Perubahan tersebut menjadi sebuah Formula untuk penanganan konflik/sengketa secara terpadu dan bersinergi antar stakeholder instansi Polda Aceh dan Pemda Aceh sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan sengketa/konflik pertanahan yang terjadi di Aceh.
 - Pelaksanaan kewenangan penanganan konflik/sengketa yang dilaksanakan secara terkoordinasi, bersinergi serta sebagai narahubung antar stakeholder yang sangat responsif terhadap permasalahan sengketa/konflik pertanahan.
 - Untuk mendukung Proyek perubahan ini sangat diperlukan beberapa dasar hukum yang harus dibuat antara lain: SK Gubernur tentang pembentukan Satgas Yusenghan dan adanya Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Satgas Yusenghan untuk menjadi acuan kerja bagi pelaksanaan tugas Satgas Yusenghan. Oleh karena itu peranan Biro Hukum Setda Aceh dan Kanwil BPN Aceh sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan Proyek perubahan ini.
 - Dibutuhkan sumbangsih pemikiran peserta rapat untuk penyusunan SK Gubernur dan SOP Satgas Yusenghan sehingga keberadaan Satgas Yusenghan nantinya dapat teralisasi secara Optimal dan berkesinambungan.
- Tanggapan peserta rapat dari Bidum Polda Aceh Ipda Ade Syahputra, SH. Jabatan Paur II Subbid Sunluhuk Bidang Hukum Polda Aceh dengan rincian sebagai berikut:
 - Bidum Polda Aceh dalam melaksanakan tugas pokoknya antara lain yakni penyusunan naskah akademik dan konsep rancangan peraturan perundangan, pembahasan, pengkajian, harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan kepolisian yang diajukan oleh Polri dan pemberian saran masukan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
 - Mendukung Proyek perubahan yang digagas oleh pimpinan rapat dan menyajikan pranti lunak yang dibutuhkan untuk penyusunan SK Gubernur dan SOP Satgas Yusenghan.
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Satgas Yusenghan disarankan dibuat dalam bentuk Flowchart sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan kewenangan penanganan konflik/sengketa.
 - konsep Surat Keputusan Gubernur Aceh yang dibuat agar memenuhi kaidah hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam Diklum yang disusun.
 - Kedudukan unit Satgas dalam Susunan Personalia agar melibatkan seluruh Stakeholder instansi baik di lingkungan Polda Aceh maupun di jajaran Pemda Aceh.

c. Tanggapan....

-3-

- Tanggapan Peserta Rapat koordinasi dari perwakilan Pemerintah Aceh, Bpk. TEUKU MANSHUR NASMI, SKM., M.Sc (Medi) Jabatan Pengelola Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda Aceh, dengan rincian sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Gubernur adalah penetapan yang bersifat konkret, individual dan final ditujukan langsung kepada pihak yang dimaksud sebagai solusi dari suatu permasalahan dengan tetap untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau dalam menyelesaikan kewenangan pemerintah daerah.
 - Biro Hukum Setda Aceh mendukung Proyek perubahan ini dan akan memestikan konsep Surat Keputusan yang dibuat sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.
 - Format Standar Operasional Prosedur dalam bentuk Flowchart untuk Pelaksanaan Tugas Satgas Yusenghan sangat efisien diterapkan karena memudahkan pelaksanaan tugas dalam Pelaksanaan kewenangan penanganan konflik/sengketa.
 - Dalam menyusun Rancangan Keputusan Gubernur, Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa dapat menunjuk dan untuk selanjutnya menetapkan pejabat yang berasal dari unsur SKPD dan/atau UKPD terkait sebagai anggota Tim Penyusunan.
 - Pembuatan surat keputusan memiliki unsur-unsur atau komponen yang harus diperhatikan sebagai syarat yang wajib ada dan dibuktikan, hal ini adalah penting karena akan berpengaruh pada saat tidaknya surat keputusan tersebut antara lain konsideran (landasan hukum), Disideratum (isi surat / tujuan) dan Diklum (rumusan tentang keputusan atau keetapan).
 - Biro Hukum Setda Aceh akan menjadi narahubung bagi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 untuk memperoleh legal standing Pembentukan Satgas Yusenghan dan Pemerintah Aceh.
- Tanggapan Peserta Rapat koordinasi dari perwakilan Kanwil BPN Provinsi Aceh, UMARANI AZGHA, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Perencanaan Kanwil BPN Provinsi Aceh:
 - Dalam penyusunan SK Gubernur untuk pembentukan Satgas Yusenghan agar konsep Surat Keputusan yang dibuat sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.
 - Konsideran atau landasan hukum yang digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Permen ATR / BPN tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
 - Diklum dalam Draft SK Gubernur Satgas Yusenghan agar menginventarisir segala permasalahan pertanahan yang menjadi trend tertinggi di Provinsi Aceh seperti:
 - Pengusahan dan Pemilikan Tanah;
 - Pendaftaran Hak dan Pendaftaran Tanah;
 - Batas atau letak bidang tanah;
 - Keabsahan suatu hak;
 - pemberian hak atas tanah;
 - pendaftaran hak atas tanah non sertifikat termasuk peralihannya dan penonbitan tanda bukti haknya;
 - Penanganan sengketa Tapal batas.

d) Format....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM

ABSENSI RAPAT PENYUSUNAN DRAFT SK GUBERNUR ACEH DAN PENYUSUNAN SOP SATGAS YUSENGHAN HARI SENIN TANGGAL 19 SEPTEMBER 2022

1	2	3	4	5
No	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MULIADI, S.H., M.H.	AKBP/73050946	KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH	
2.	ADE SYAHPUTRA, SH.	IPDA/88100926	PAUR II SUBBID SUNLUHUK BIDANG HUKUM POLDA ACEH	
3.	TEUKU MANSHUR NASMI, SKM., M.Sc (Med)	PEMBINA/ 197201051994031003	PENGLOLA BANTUAN HUKUM PADA BIRO HUKUM SETDA ACEH	
4.	SRI ASTUTE, SP	PENATA/ 1978062719980310001	STAF BIDANG SUBBAG PROGRAM MONEV DATA DAN INFORMASI DISTANBUN ACEH	
5.	UMARANI AZGHA, S.H., M.H.	PENDAW 199209202018011001	ANALIS HUKUM PERTANAHAN KANWIL BPN PROVINSI ACEH	

Banda Aceh, 19 September 2022
DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH

ADE SYAHPUTRA, S.H., M.H.
KONSISARIS BESKREKSI NRP 72110531



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022**



DOKUMENTASI





DRAFT SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR


GUBERNUR ACEH
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS YUSTISI SENGKETA LAHAN DI ACEH
GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, penanganan sengketa pertanahan dan konflik pertanahan dilakukan melalui tahapan pengkajian kasus; gelar awal; penelitian; elapsus hasil penelitian; rapat koordinasi; gelar akhir; dan penyelesaian kasus, yang dilakukan dengan tahapan penanganan kasus secara berurutan;
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terutama dalam pemetaan masalah pertanahan yang dilakukan untuk menghasilkan peta sebaran sebagai bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi strategi penanganan, pemecahan atau penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Aceh, perlu adanya satuan tugas yustisi sengketa lahan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Yustisi Sengketa Lahan di Aceh;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Berasas Nasional di Aceh;
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Quam Nangroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat;
- Quam Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

14. Quam...../2-

- 2 -

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian sengketa/perselisihan Adat dan Istiadat;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/67702011, 1054/MAA/XII/201, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampeng dan Mukim atau nama lain di Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Yustisi Sengketa Lahan di Aceh yang selanjutnya disebut "Satgas Yusengahan" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;

KEDUA : Satgas Yusengahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pemetaan masalah pertanahan yang dilakukan untuk menghasilkan peta sebaran sebagai bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi strategi penanganan, pemecahan atau penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan, masalah yang berkaitan dengan:

- pengususan dan pemilikan tanah;
- penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- batas atau letak bidang tanah;
- keabsahan suatu hak;
- pemberian hak atas tanah;
- pendaftaran hak atas tanah non sertifikat termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya; dan
- penanganan sengketa tapal batas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Satgas Yusengahan bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan Aceh serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh.....

ACHMAD MARZUKI

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Presiden RI;
- Menteri Dalam Negeri RI;
- Menteri Hukum dan HAM RI;
- Menteri ATR/BPN RI;
- Kepala Badan Intelijen Negara;
- Panglima TNI;
- Kepala Kepolisian RI;
- Panglima Iskandar Muda;
- Kapolda Aceh;
- Kajari Aceh;
- Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
- Yang bersangkutan

PARAF KOORDINASI :

- Kakanwil BPN Aceh.
()
- Kadis Pertanahan Aceh.
()
- Karo Hukum Setda Aceh.
()

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR / 2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
YUSTISI SENGKETA LAHAN DI ACEH.....

SUSUNAN PERSONALIA SATGAS YUSENGAHAN

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1	2	3	4
1	Gubernur Aceh	Pengarah	
2	Kapolda Aceh	Pengarah	
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kears Sengketa Aceh	Pembina	
4	Direkturkriminal Polda Aceh	Ketua	
5	Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh	Wakil Ketua I	
6	Ka. Dinas Pertanahan dan Perkebunan Aceh	Wakil Ketua II	
7	Ka. Dinas Pertanahan Aceh	Wakil Ketua III	
8	Kepala Biro Hukum Setda Aceh	Wakil Ketua IV	
9	Kasubbag Umum dan Hubungan Masyarakat Karwil BPN Aceh	Anggota	
10	Kasi Perpetan dan Pemasaran Kawasan Hutan Dinas LHK Aceh	Anggota	
11	Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Anggota	
12	Kabid Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah Dinas Pertanahan Aceh	Anggota	
13	Kabid Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah Dinas Pertanahan Aceh	Sekretaris	
14	Kabid Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah Karwil BPN Aceh	Anggota	
15	Kabag Analis Ditintelkam Polda Aceh	Ketua	
16	Kabag Peraturan Perundang-undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh	Wakil Ketua	
17	Kabag. Kajian Strategis, Riset dan Peridangan MPU Aceh	Sekretaris	
18	Kasubdit Kamong Ditintelkam Polda Aceh	Anggota	
19	Kabid Survei dan Pemetaan Karwil BPN Aceh	Anggota	
20	Kabid Perlindungan dan Konservasi SDA Dinas LHK Aceh	Anggota	
21	Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Setda Aceh	Anggota	
22	Pokja unit Penegakkan Hukum		
23	Kasubdit 2 Ditreskrim Polda Aceh	Ketua	
24	Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa Karwil BPN Provinsi Aceh	Wakil Ketua	
25	Kabid Pertanahan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah	Sekretaris	
26	Kabid Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan	Anggota	
27	Kasub 1 Subdit 2 Ditreskrim Polda Aceh	Anggota	
28	Kasub 2 Subdit 2 Ditreskrim Polda Aceh	Anggota	
29	Kasub 3 Subdit 2 Ditreskrim Polda Aceh	Anggota	
30	Kasubbag Non Litigasi dan HAM Biro Hukum Setda Aceh	Anggota	
31	Kasi Fasilitas Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dinas Pertanahan Aceh	Anggota	
32	Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	Kelompok Ahli	
33	Ketua Majelis Adat Aceh	Kelompok Ahli	
34	Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (unsur akademis)	Kelompok Ahli	

Pj. GUBERNUR ACEH

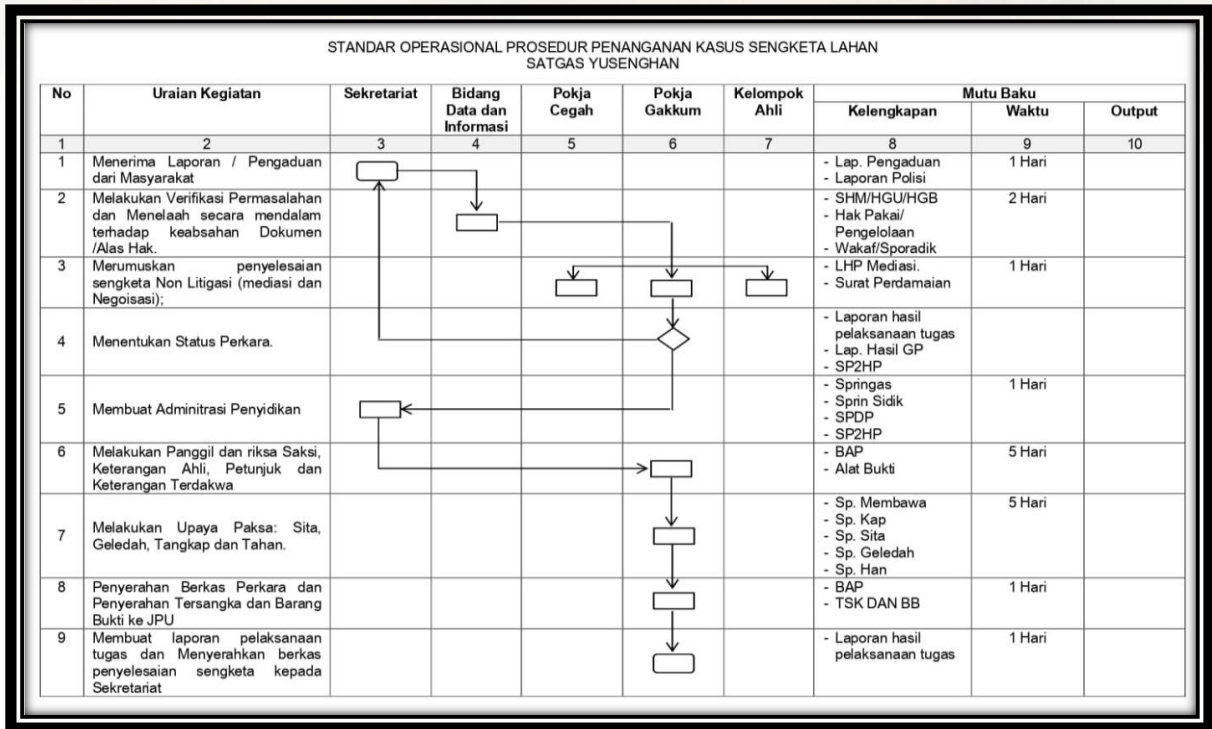
ACHMAD MARZUKI



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022



SOP SATGAS YUSENGHAN





LAMPIRAN 3 MOBILISASI STAKEHOLDER

**LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
YUSENGHAN
STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH**



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022**



KAPOLDA ACEH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor : SP/ 02 /X/2022/Polda Aceh

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. AHMAD HAYDAR, S.H., M.M.
Pangkat : INSPEKTUR JENDERAL POLISI
Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH

Dengan ini saya memberikan dukungan terhadap Proyek Perubahan berjudul "Yusenghan Strategi Pendekatan *Soft Approach* dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Aceh" yang diajukan oleh:

Nama : MULIADI, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 73050646
Jabatan : KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH.
Instansi : POLRI

Demikian pernyataan dukungan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga Proyek Perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh dan di lingkungan Pemerintah Aceh.

Banda Aceh, 03 Oktober 2022
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH


Drs. AHMAD HAYDAR, S.H., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022



KEPALA PPSDM KEMENTERIAN ATR/BPN RI

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. AGUSTYARSYAH, S. SIT., S.H., M.P.
NIP : 197008111994031010
Jabatan : KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Instansi : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA.

Dengan ini saya memberikan dukungan terhadap Proyek Perubahan berjudul "**YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH**" yang diajukan oleh:

Nama : MULIADI, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 73050646
Jabatan : KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH.
Instansi : POLRI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, Semoga Proyek Perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh dan di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Jakarta, 27 September 2022
Pemberi dukungan


Dr. AGUSTYARSYAH, S. SIT., S.H., M.P.
NIP. 197008111994031010





INSPEKTORAT POLHUKAM KEMENKO POLHUKAM RI

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAUZI RUSLI, S.H., CGCAE.
Pangkat / NRP : BRIGJEN TNI / 32590
Jabatan : INSPEKTORAT POLHUKAM
Instansi : KEMENKO POLHUKAM RI

Dengan ini saya memberikan dukungan terhadap Proyek Perubahan berjudul "YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH" yang diajukan oleh:

Nama : MULIADI, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 73050646
Jabatan : KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH.
Instansi : POLRI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, Semoga Proyek Perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh dan di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Jakarta, 29 September 2022
Pemberi dukungan


FAUZI RUSLI, S.H., CGCAE
BRIGJEN TNI





SEKRETARIS BPI KEMENDES RI

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. RAZALI, M.Si
NIP : 196211101990031008
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
Instansi : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI R.I

Dengan ini saya memberikan dukungan terhadap Proyek Perubahan berjudul "**YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH**" yang diajukan oleh:

Nama : MULIADI, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 73050646
Jabatan : KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH.
Instansi : POLRI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga Proyek Perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh dan di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Jakarta, 30 September 2022
Pemberi dukungan

Ir. RAZALI, M.Si
NIP. 196211101990031008





KARO LEMDIKLAT POLRI

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. SUSILO TEGUH RAHARJO, M. Si.
Pangkat : BRIGADIR JENDERAL POLISI
Jabatan : KARO BINDIKLAT LEMDIKLAT POLRI.
Instansi : POLRI

Dengan ini saya memberikan dukungan terhadap Proyek Perubahan berjudul "YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH" yang diajukan oleh:

Nama : MULIADI, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 73050646
Jabatan : KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH.
Instansi : POLRI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, Semoga Proyek Perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh dan di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Jakarta, 28 September 2022
Pemberi dukungan

Drs. SUSILO TEGUH RAHARJO, M. Si.
BRIGADIR JENDRAL POLISI





SEKDA ACEH

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BUSTAMI S.E, M. Si
NIP : 196707221996031002
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH ACEH.
Instansi : PEMERINTAH ACEH.

Dengan ini saya memberikan dukungan terhadap Proyek Perubahan berjudul **"YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH"** yang diajukan oleh:

Nama : MULIADI, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 73050646
Jabatan : KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH.
Instansi : POLRI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga Proyek Perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh dan di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 03 Oktober 2022
Pemberi dukungan

BUSTAMI S.E, M.Si
NIP. 196707221996031002





KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI ACEH

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. MAZWAR, S.H., M. Hum.
NIP : 196512101993031004
Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. ACEH
Instansi : KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. ACEH

Dengan ini saya memberikan dukungan terhadap Proyek Perubahan berjudul **"YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH"** yang diajukan oleh:

Nama : MULIADI, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 73050646
Jabatan : KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH.
Instansi : POLRI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga Proyek Perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh dan di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 04 Oktober 2022
Pemberi dukungan

Dr. MAZWAR, S.H., M. Hum.
NIP. 196512101993031004





KADIS PERTANAHAN ACEH

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. SUNAWARDI, M. Si.
NIP : 196912241996031004
Jabatan : KEPALA DINAS PERTANAHAN ACEH
Instansi : DINAS PERTANAHAN ACEH

Dengan ini saya memberikan dukungan terhadap Proyek Perubahan berjudul **"YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH"** yang diajukan oleh:

Nama : MULIADI, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 73050646
Jabatan : KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH.
Instansi : POLRI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga Proyek Perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh dan di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 10 Oktober 2022
Pemberi dukungan

Ir. SUNAWARDI, M. Si.,
NIP. 196912241996031004





KADIS LHK ACEH

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. HANAN, S.P., M.M.
NIP : 196807051991031006
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH
Instansi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

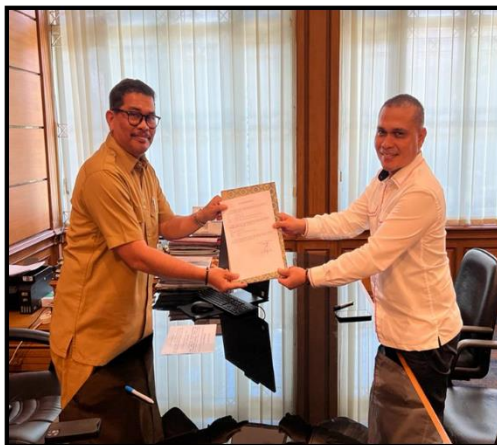
Dengan ini saya memberikan dukungan terhadap Proyek Perubahan berjudul **"YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH"** yang diajukan oleh:

Nama : MULIADI, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 73050646
Jabatan : KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH.
Instansi : POLRI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga Proyek Perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh dan di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 06 Oktober 2022
Pemberi dukungan

A. HANAN, S.P., M.M.
NIP. 196807051991031006





KADISTANBUN ACEH

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. CUT HUZAIMAH, M.P
NIP : 196602171992032003
Jabatan : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
Instansi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

Dengan ini saya memberikan dukungan terhadap Proyek Perubahan berjudul **"YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH"** yang diajukan oleh:

Nama : MULIADI, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 73050646
Jabatan : KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH.
Instansi : POLRI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga Proyek Perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh dan di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Banda Aceh, **05** Oktober 2022
Pemberi dukungan

Ir. CUT HUZAIMAH, M.P.
NIP. 196602171992032003





DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAHKUALA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.
Pangkat / Nip : Pembina / 19741220 199903 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiahkuala

Dengan ini saya memberikan dukungan terhadap Proyek Perubahan berjudul **"YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH"** yang diajukan oleh:

Nama : Muliadi, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 73050646
Jabatan : Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Aceh.
Instansi : Polri

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, Semoga Proyek Perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh dan di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 6 Oktober 2022
Pemberi dukungan


Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.
19741220 199903 1 001





KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tgk. H. FAISAL ALI
Jabatan : KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
Instansi : MPU ACEH

Dengan ini saya memberikan dukungan terhadap Proyek Perubahan berjudul **"YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH"** yang diajukan oleh:

Nama : MULIADI, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 73050646
Jabatan : KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH.
Instansi : POLRI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga Proyek Perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh dan di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 07 Oktober 2022
Pemberi dukungan



Tgk. H. FAISAL ALI





MAJELIS ADAT ACEH

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tgk. Yus Dedi
Jabatan : Wakil Ketua I Majelis Adat Aceh.

Dengan ini saya memberikan dukungan terhadap Proyek Perubahan berjudul **"YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH"** yang diajukan oleh:

Nama : Muliadi, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : AKBP / 73050646
Jabatan : Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Aceh.
Instansi : Polri

Demikian pernyataan dukungan ini saya buat dengan sebenarnya, Semoga Proyek Perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya di lingkungan Ditreskrimum Polda Aceh dan di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 7 Oktober 2022
Pemberi dukungan

Tgk. Yus Dedi





LAMPIRAN 4 SOSIALISASI GIAT

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH





KEMENTERIAN KEMAMPUAN POLDA ACHEH
DIREKTORAT RESESI KEMAMPUAN POLDA ACHEH

NOTULEN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENGESAHAN KONTAK PERSAMAAN DI ACHEH DENGAN SOFT APPROACH
DALAM SOSIALISASI PEMBENTUKAN SATAS YUSENGHAN

Hasil / Tanggal : Kamis / 27 Oktober 2022
Pukul : 10.00 wib s.d 14.00 wib
Tempat : Susana Tama Caffe, Jln. T. Nyak Maken No 126 Lampong Banda Aceh
Peserta : Kausab 2 Dikembangkan Polas Aceh (Project Leader)
1. Kausab 2 Dikembangkan Polas Aceh
2. Pengantar Banda Aceh Polas Aceh
3. Aspek Kaitan Persepsi Kaitan Polas Aceh
4. Staf subang program moner data dan informasi Dikembangkan Aceh
5. Para Kaitan Subang 2 Dikembangkan Polas Aceh
6. Staf bidang Pengendalian Kaitan Lingsung Dikembangkan Aceh
7. Staf MPU Aceh
8. Staf subang MAA Aceh
9. Mahasiswa Top Unir, Mahasiswa
10. Mahasiswa FSI un anary
11. Mahasiswa FII unir, Spk subang
12. Mahasiswa umum

Materi rapat : Focus Group Discussion dan Sosialisasi Pembentukan Satgas Yusenghan
Strategi Pendekatan Soft Approach Dalam Penyusunan Konflik Perlawanan di
Provinsi Aceh

1. Dasar:
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1000/VI/2002 tanggal 13 Juli 2002 tentang Pembentukan Satuan Tugas Yusenghan;
c. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1000/VI/2002 tanggal 13 Juli 2002 tentang Pembentukan Satuan Tugas Yusenghan;
d. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1000/VI/2002 tanggal 13 Juli 2002 tentang Pembentukan Satuan Tugas Yusenghan;
e. Surat...

2. Pelaksanaan:
a. Pelaksanaan Rapat dengan Pimpinan Rapat ANP MULIAH, S.H., M.H. selaku Project Leader
b. Pembentukan Satgas Yusenghan merupakan Proyek perubahan yang digagas oleh
c. Diharapkan Proyek Perubahan tersebut menjadi sebuah Formula untuk
d. Pelaksanaan Satgas Yusenghan merupakan Pelaksanaan kewenangan penanganan
e. Proses penyelesaian sengketa perlawanan yang diorganisir oleh satgas Yusenghan
f. Tanggapan Peserta Rapat kordinasi dan perwakilan Pemerintah Aceh, Bpk. TEUKU
g. Fasilitasi perlawanan di Provinsi Aceh merupakan hal yang selalu muncul dan
h. Bagaimana...

3. Kesimpulan:
a. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan mempunyai
b. Peningkatan konflik-konflik secara terpadu dan berimbang antara stakeholder internal
c. Rancangan Proyek Perubahan yang berfokus Yusenghan (Yusenghan Satgas Lahan)
d. Selain Peserta Rapat Focus Group Discussion (FGD) mendukung terhadap Pembentukan
e. Demikian...

KEMENTERIAN KEMAMPUAN POLDA ACHEH
DIREKTORAT RESESI KEMAMPUAN POLDA ACHEH

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENGESAHAN KONTAK PERSAMAAN DI ACHEH DENGAN SOFT APPROACH
DALAM SOSIALISASI PEMBENTUKAN SATAS YUSENGHAN

No	NAMA	PROKATIMPP	JABATAN	SALAH TUGAS
1	MULIAH, S.H., M.H.	ANP/200046	KASABOT 2 DIREKTORAT POLDA ACHEH	
2	TEUKU MENDIRI, M.H., M.H.	PENKAB 1000/0000000000	KEMENTERIAN KEMAMPUAN POLDA ACHEH	
3	UMARAH ADZHA, S.H., M.H.	PENKAB 1000/0000000000	KEMENTERIAN KEMAMPUAN POLDA ACHEH	
4	OPHAN ZAKWILL, S.P.	PENKAB 1000/0000000000	STAF BIDANG KEMAMPUAN POLDA ACHEH	
5	SRI ATUTTE, SP	KEMKAB 1000/0000000000	STAF BIDANG KEMAMPUAN POLDA ACHEH	
6	PUTRA LUBIS, ST	PENKAB 1000/0000000000	STAF BIDANG KEMAMPUAN POLDA ACHEH	
7	TJ. ABDUL MUTALIB, S.A	STAF MPU ACHEH		
8	FAUZIL AKIL, SE	STAF SEKRETARIAT ACHEH		
9	FRANSISKA, SH	ANP/10007	KEMKABOT 2 DIREKTORAT POLDA ACHEH	
10	WILDA LUBIS, SH	ANP/10008	KEMKABOT 2 DIREKTORAT POLDA ACHEH	
11	JOHANNAL, SH	ANP/10009	KEMKABOT 2 DIREKTORAT POLDA ACHEH	

27 Oktober 2022



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022

DOKUMENTASI





LAMPIRAN 5 PENYUSUNAN DRAFT MoU

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH





DRAFT MoU



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH ACEH
DENGAN
PEMERINTAHAN ACEH
NOMOR PIHAK PERTAMA : 18/Ma/1 / 30/2022
NOMOR PIHAK KEDUA : 18/ /

VERTIKAL
PERANGKATAN SENGKETA / KONFLIK PERTANAHAN DI ACEH

Pada Hari ini Senin tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (7-11-2022) bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. AHMAD HAYDAR, S.H., M.M., selaku **KEPOLISIAN DAERAH ACEH**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. MAYOR JENDERAL TRI (PURN) AHMAD MARZUKI, selaku **PEJABAT GUBERNUR ACEH** berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terhitung dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Aceh yang berada di bawah Kaptel yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengagkukan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

-2-

pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Aceh.

2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh.

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kestrawanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Berasal Nasional di Aceh;
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

-3-

11. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Kualifikasi Restoratif;
12. Qanun Nangroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat;
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan sengketa/pertanahan adat dan istiadat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengagkukan dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka kegiatan Penanganan Sengketa / Konflik Pertanahan di Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKUD DAN TUJUAN
Paragraf 1

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka kegiatan Penanganan Sengketa / Konflik Pertanahan di Aceh.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka Penanganan Sengketa / Konflik Pertanahan di Aceh.

BAB II
RUANG LINGKUP
Paragraf 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah Penanganan Sengketa / Konflik Pertanahan di Aceh.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

-4-

BAB III
PELAKSANAAN
Paragraf 3

(1) Nota Kesepahaman ini akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai Pelaksanaan dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas akan disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB IV
SOSIALISASI
Paragraf 4

(1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Paragraf 5

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

-5-

BAB VI
PENSIJAYAAN
Paragraf 6

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Addendum
Paragraf 7

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Paragraf 8

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

-6-

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Paragraf 9

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri terlebih dahulu mengkoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB XI
PENUTUP
Paragraf 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertera pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) set masing-masing bermaterai cukup, dibuatnya cnp, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

Drs. AHMAD HAYDAR, S.H., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

AHMAD MARZUKI
MAYOR JENDERAL TRI (PURN)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	





DOKUMENTASI





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

Nomor : B/1006/IX/DIK.2.5/2022/Resum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Undangan

Banda Aceh, 27 Oktober 2022

Kepada
Yth. **KARO HUKUM SETDA ACEH**

di
Tempat

1. Rujukan:
a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Depati Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4189/D.APOP/07.01 tanggal 13 Juli 2022 Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;
c. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VI/DIK.2.5/2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022;
d. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VIII/DIK.2.5/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka penyusunan Nota Kesepahaman antara Polda Aceh dengan Pemerintah Aceh tentang Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanian di Aceh, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:
a. Hari / Tanggal : Jumat / 28 Oktober 2022
b. Pukul : 10.00 WIB s.d selesai;
c. Tempat : Aula Rapat Ditreskrim Polda Aceh.

3. Demikian untuk menjadi maklum atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Pj. Gubernur Aceh
2. Kapolda Aceh
3. Inwasa Polda Aceh
4. Kakanwil BPN Aceh
5. Kabidpropam Polda Aceh

AS. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH
ADE HARIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73050646

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

Nomor : B/1006/IX/DIK.2.5/2022/Resum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Undangan

Banda Aceh, 27 Oktober 2022

Kepada
Yth. **KAKANWIL BPN ACEH**

di
Tempat

1. Rujukan:
a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Depati Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4189/D.APOP/07.01 tanggal 13 Juli 2022 Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;
c. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VI/DIK.2.5/2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022;
d. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VIII/DIK.2.5/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka penyusunan Nota Kesepahaman antara Polda Aceh dengan Pemerintah Aceh tentang Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanian di Aceh, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:
a. Hari / Tanggal : Jumat / 28 Oktober 2022
b. Pukul : 10.00 WIB s.d selesai;
c. Tempat : Aula Rapat Ditreskrim Polda Aceh.

3. Demikian untuk menjadi maklum atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Pj. Gubernur Aceh
2. Kapolda Aceh
3. Inwasa Polda Aceh
4. Kakanwil BPN Aceh
5. Kabidpropam Polda Aceh

AS. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH
ADE HARIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73050646

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

NOTA - DINAS

Nomor : BIND- 112 /VIII/DIK.2.5/2022/ Resum

Kepada : 1. Yth. Kepala Operasi Polda Aceh.
2. Yth. Kepala Bidang Hukum Polda Aceh.

Dari : Ditreskrim Polda Aceh.

Perihal : Rapat Penyusunan Draf Nota Kesepahaman.

1. Rujukan :
a. Surat Depati Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4189/D.APOP/07.01 tanggal 13 Juli 2022 Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;
b. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VI/DIK.2.5/2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022;
c. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VIII/DIK.2.5/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam Rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka Pelaksanaan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada:
a. Hari / Tanggal : Jumat / 28 Oktober 2022
b. Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;
c. Tempat : Aula Ditreskrim Polda Aceh;
d. Acara : Rapat penyusunan Nota Kesepahaman antara Polda Aceh dengan Pemerintah Aceh tentang Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanian di Aceh.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Banda Aceh, 27 Oktober 2022
KASUBIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH
ADE HARIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73050646

Tembusan :
1. Kapolda Aceh
2. Inwasa Polda Aceh
3. Kabidpropam Polda Aceh

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

ABSENSI RAPAT PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN POLDA ACEH DAN PEMERINTAH ACEH
HARI JUMAT TANGGAL 28 OKTOBER 2022

No	NAMA	PANGKAT/OL	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MULADI, S.H., M.H.	AKBP / IVa	KASUBIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH	
2.	HERI MANJA PUTRA, S.H., M.H.	AKBP / IVa	KASUBID SUNLAKUM BIKUM POLDA ACEH	
3.	EKO SAPUTRA BAKARA, S.I.K	KOMPOL / IVa	KASUBAG PAKAT KERMA BIRO OPS POLDA ACEH	
4.	HAMDAI, S.H.	PENATA / I/86	KASUBAG NASKAM KERASADA DAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM	
5.	UMARANI AZHWA, S.H., M.H.	PENDA	ANALIS HUKUM PERTANAHAN KANWIL BPN PROVINSI ACEH	

Banda Aceh, 28 Oktober 2022
KASUBIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH
ADE HARIANTO, S.H., M.H.
AKBP NRP 73050646



PELATIHAN KEPIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM

**NOTULEN PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN POLDA ACEH DAN PEMERINTAH ACEH
PENANGANAN SENGKETA / KONFLIK PERTANAHAN DI ACEH**

Hari / Tanggal : Jumat / 28 Oktober 2022;
Pukul : 10.00 wib s.d 12.00 wib
Tempat : Ruang Kerja Kasubdit 2 Ditreskrim Polda Aceh
Pimpinan Rapat : Kasubdit 2 Ditreskrim Polda Aceh (Project Leader)
Peserta : 1. Kasubid Sunluhuk Bidum Polda Aceh;
2. Kasubag Pakat Kerma Biropo Polda Aceh
3. Kasubag Naskah Kerjasama dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Sekretariat Daerah;
4. Analis Hukum Pertanian Kamwil BPN Aceh;
5. Personel Subdit 2 Ditreskrim Polda Aceh;
Materi rapat : Penyusunan Draft Nota Kesepahaman Polda Aceh dengan Pemerintah Aceh tentang Penanganan Sengketa / Konflik Pertanian di Aceh.

1. Dasar.

- Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4189/D/4/PDP/07/01 tanggal 13 Juli 2022 Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VI/DIK.2.5/2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.
- Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/760/VIII/DIK.2.5/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam Rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh;
- Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Nomor: B/8910/DIK.2.5/2022/Resum tanggal 15 September 2022 perihal Undangan Rapat Penyusunan Draft Surat Keputusan Gubernur Aceh Pembentukan Satgas Yusengahan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Satgas Yusengahan.
- Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Nomor: B/1005/DIK.2.5/2022/Resum tanggal 27 Oktober 2022 perihal Undangan Rapat Penyusunan Draft Nota Kesepahaman Polda Aceh dengan Pemerintah Aceh tentang Penanganan Sengketa / Konflik Pertanian di Aceh.

2. Pelaksanaan.....

-2-

2. Pelaksanaan

- Pembukaan Rapat oleh Pimpinan Rapat **AKBP MULIADI, S.H., M.H.** selaku Project Leader dilanjutkan dengan penyampaian materi rapat dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembentukan Satgas Yusengahan merupakan Proyek perubahan yang digagas oleh Kasubdit 2 Ditreskrim Polda Aceh selaku Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.
 - Diharapkan Proyek Perubahan tersebut menjadi sebuah Formulasi untuk Penanganan konflik/sengketa secara terpadu dan bersinergi antar stakeholder instansi Polda Aceh dan Pemda Aceh sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan sengketa/konflik pertanian yang terjadi di Aceh.
 - Pelaksanaan kewenangan penanganan konflik/sengketa yang dilaksanakan secara terkoordinasi, bersinergi serta sebagai narahubung antar stakeholder yang sangat responsif terhadap permasalahan sengketa/konflik pertanian.
 - Landasan hukum yang telah dibuat dan telah menjadi Draft antara lain SK Gubernur tentang pembentukan Satgas Yusengahan dan Acuan kerja berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Satgas Yusengahan.
 - Diperlukan Nota Kesepahaman antara Stakeholder Polda Aceh dan Pemerintah Aceh sebagai bentuk implementasi kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan Produk Hukum lainnya.
 - Dibutuhkan sumbangh pemikiran peserta rapat untuk penyusunan Draft Nota Kesepahaman antara Stakeholder Polda Aceh dan Pemerintah Aceh sehingga nantinya dapat terealisasi secara Optimal dan berkesinambungan.
- Tanggapan peserta rapat dari Bidum Polda Aceh **AKBP Heri Manu Putra, SH, MH** Jabatan Kasubid Sunluhuk Bidang Hukum Polda Aceh dengan rincian sebagai berikut:
 - Bidum Polda Aceh dalam melaksanakan tugas pokoknya antara lain yakni penyusunan naskah akademik dan konsep rancangan peraturan perundangan, pembahasan, pengkajian, harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan kepolisian yang diajukan oleh Polri dan pemberian saran masukan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - Mendukung Proyek perubahan yang digagas oleh pimpinan rapat dan menyiapkan piranti lunak yang dibutuhkan untuk penyusunan SK Gubernur dan SOP Satgas Yusengahan.
 - Penyusunan Draft Nota Kesepahaman antara Stakeholder Polda Aceh dan Pemerintah Aceh agar memuat klausul – klausul pasal yang jelas sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dalam penanganan konflik/sengketa pertanian.
 - Draft Nota Kesepahaman antara Stakeholder Polda Aceh dan Pemerintah Aceh yang dibuat agar memenuhi kaidah hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam klausul pasal yang disusun.
- Tanggapan peserta rapat dari Biroops Polda Aceh **Kompol Eko Saputra Baskara, S.I.K** Jabatan Kasubag Pakat Kerma Biro Ops Polda Aceh dengan rincian sebagai berikut:
 - Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka kegiatan Penanganan Sengketa / Konflik Pertanian di Aceh.

b) Tujuan.....

-3-

- Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka Penanganan Sengketa / Konflik Pertanian di Aceh.
- Nota Kesepahaman ini agar ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai Pelaksanaan dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- Tanggapan Peserta Rapat koordinasi dari perwakilan Pemerintah Aceh, Bpk. **Hamdan, SH** Jabatan Kasubag Naskah Kerjasama dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - Draft Nota Kesepahaman antara Stakeholder Polda Aceh dan Pemerintah Aceh bersifat konkret, individual dan final diajukan langsung kepada para pihak yang dimaksud sebagai solusi dari suatu permasalahan dengan tetap untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
 - Biro Hukum Setda Aceh mendukung Proyek perubahan ini dan akan memastikan konsep Nota Kesepahaman yang dibuat sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.
 - Biro Hukum Setda Aceh akan menjadi narahubung bagi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 untuk memperoleh Evidence dari Pemerintah Aceh sehingga Proyek Perubahan yang digagas dapat terlaksana.
- Tanggapan Peserta Rapat koordinasi dari perwakilan Kamwil BPN Provinsi Aceh, Bpk. **UMARANI AZKHA, S.H., M.H.**, Jabatan Analis Hukum Pertanian Kamwil BPN Aceh;
 - Dalam penyusunan Draft Nota Kesepahaman agar dibuat sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.
 - Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
 - landasan hukum yang digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Permen ATR / BPN tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanian.

3. Kesimpulan

- Proyek Perubahan yang digagas oleh Kasubdit 2 Ditreskrim Polda Aceh merupakan sebuah formula yang efektif untuk mencegah, meminimalisir serta menyelesaikan sengketa/konflik pertanian yang terjadi di Aceh.
- Maksud dan tujuan Draft Nota Kesepahaman antara Polda Aceh dan Pemerintah Aceh ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Penanganan Sengketa / Konflik Pertanian di Aceh.
- Stakeholder dari Pemprov Aceh (Biro Hukum Setda Aceh) dan Kamwil BPN Provinsi Aceh mendukung sepenuhnya untuk implementasi Proyek Perubahan ini dan akan memfasilitasi kebutuhan data / dokumen serta legalitas terhadap proyek perubahan ini.

4. Draft.....

-4-

- Draft Nota Kesepahaman yang dibuat agar memenuhi kaidah hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam klausul pasal yang disusun.
- Demikian Notulen Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Penyusunan Draft Nota Kesepahaman antara Polda Aceh dan Pemerintah Aceh ini dibuat sebagai wujud implementasi Program Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 dan sebagai bahan masukan pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Pimpinan Rapat
KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA ACEH

Selaku
Project Leader
MULIADI, S.H., M.H.
AKBP NRP 73050646

Banda Aceh, 28 Oktober 2022

NOTULEN
MUHAMMAD YACOB, S.I.P
IPDA NRP 82051392



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022**



LAMPIRAN 6 MONITORING DAN EVALUASI

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN YUSENGHAN STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH DIREKTORAT RESerse KRIMINAL UMUM Jalan T. Nyak Aneel Jaulingke Banda Aceh 23114 LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PERUBAHAN (YUSENGHAN) STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH A. LATAR BELAKANG Kasus pertanahan yang terjadi di Aceh cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada semester I tahun 2021 tercatat 25 kasus sedangkan pada semester I tahun 2022 tercatat 38 kasus (meningkat 52%), meningkatnya kasus pertanahan mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan sistem penyelesaian pertanahan serta menghambat program-program pembangunan yang sedang berjalan, sehingga kasus pertanahan di Aceh terus menjadi perhatian penting untuk diuraikan jalan keluar sehingga tanah dapat dikelola dan dimanfaatkan sebagai aset yang dapat memberikan sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Aceh, pelaksanaan kewenangan penanganan konflik bersengketa tersebut apabila dilaksanakan secara terkoordinasi dan bersinergi akan dapat mengoreksi dan meminimalisir serta menyelesaikan sengketa-konflik pertanahan yang terjadi di Aceh. Untuk itu perlu dapat ditempuh melalui pembentukan satuan tugas sengketa lahan (YUSENGHAN) berupa satuan formal efektif penyelesaian konflik bidang pertanahan di prov. Aceh dengan pendekatan soft approach yang melibatkan instansi terkait secara terpadu antara lain: polisi, kejaksaan, bpn, dinas kehutanan, dinas perikanan dan perkebunan, serta kelompok adat yaitu majelis pemusyawaratan ulama dan kalangan akademisi. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Perubahan yang berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Aceh berperan penting dalam menilai tingkat atau tidaknya hasil program kegiatan yang dilaksanakan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022. B. DASAR - Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Surat Depdik Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 41950/4.PDP.07.01 tanggal 13 Juli 2022 Tentang Penetapan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka diperingatkan untuk melaksanakan Surat Perintah ini; - Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B5605/VI/DK.2.5.022/SSDN tanggal 13 Juli 2022 Perintah Pengembangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022. 4. Surat.....	-3- - Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/709/VI/DK.2.5.022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam Rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 ditunjukkan Ditreskrim Polda Aceh; C. RUANG LINGKUP Ruang Lingkup laporan ini meliputi kegiatan pelaksanaan Program Perubahan yang berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Aceh yang telah dilaksanakan sesuai tahapan (milestone) rencana strategi pada jangka pendek. D. Maksud dan Tujuan - Maksud Sebagai bahan Analisa dan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Program Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022. - Tujuan Untuk memberikan gambaran riil dan langsung mengenai pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Program Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Aceh yang telah dilaksanakan guna mengontrol langkah dan kecapaian serta kebijakan selanjutnya. E. KEGIATAN YANG DIKALKAN Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai tahapan (milestone) rencana strategi pada jangka pendek Program Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 antara lain: - Pembentukan tim efektif Pembentukan Tim Efektif yang mendukung terlaksananya Program Perubahan sesuai Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sprin/709/VI/DK.2.5.022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Efektif dalam Rangka mendukung Pelaksanaan Program Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 ditunjukkan Ditreskrim Polda Aceh; Z. Diperolehnya.....	-3- - Diperolehnya komitmen dan dukungan stakeholder Program Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Aceh mendapat dukungan dari internal Polri maupun stakeholder eksternal antara lain: - Iyem Pol Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M. Jabatan Kepala Kepolisian Daerah Aceh; - Brigjen Pol Drs. Suilo Teguh Raharjo, M. Si. Jabatan Kepala Biro Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri; - Brigjen TNI Fandi Ruli, S.H., GSAC. Jabatan Inspektur Pahlukan Kemeteri Pahlukan RI; - Dr. Agusriyanyar, S. ST., S.H., M.P. Jabatan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI; - Ir. Ruzali, M.Si. Jabatan Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI; - Budiman S.E. M. Si. Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh; A. Haras, S.P., M.M. Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh; - Tgi. H. Fandi Al. Jabatan Ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh; - Dr. Mazzer, S.H., M. Hum. Jabatan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh; - Tgi. Yua Ded. Jabatan Ketua Majelis Adat Aceh; - Ir. Sunawadi, M. Si. Jabatan Kepala Dinas Pertanahan Aceh; - Ir. Cut Huzaimah. Jabatan Kepala Dinas Pertanahan dan Perkebunan Aceh; - Dr. M. Gausyuh, S.H., M.H. Jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. - Tersusunnya Draft SK Gubernur tentang pembentukan satgas yaitu terpadu (Yusengan) Konsep Draft Surat Keputusan Gubernur telah dilakukan koordinasi dan disetujui / disetujui oleh Kanwil BPN Aceh, Dinas Pertanahan Aceh dan Biro Hukum Setda Aceh. - Tetelaksananya sosialisasi Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk Program Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Aceh dilaksanakan antara lain: - Rapat Koordinasi Internal dengan Personel Subdi 2 Ditreskrim yang terlibat sebagai Tim Efektif dalam rangka Persiapan awal Program Perubahan dan Rancangan Proyek Perubahan dalam rangka mengidentifikasi potensi konflik / sengketa bidang Pertanahan di Provinsi Aceh dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 bertempat di Ruang Kerja Kasubdi 2 Ditreskrim Polda Aceh yang dipimpin oleh AKBP MULIAJI, S.H., M.H. Adapun peserta antar lain Para Kandi dan Panti Subdi 2 Ditreskrim Polda Aceh.
---	---	---

b. Rapat Koordinasi Eksternal dengan Stakeholder berupa Rapat Koordinasi Tim efektif dalam rangka Penyusunan Rancangan Proyek Perubahan yang berjudul "Yusengan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Aceh" yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di Ruang Kerja Kasubdi 2 Ditreskrim Polda Aceh yang dipimpin oleh AKBP MULIAJI, S.H., M.H. Adapun peserta antara lain: - TEUKU MANSUR NASRI, SKM, M.Sc (Med) Jabatan Pengelola Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda Aceh; - UMARANI AZHHA, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Aceh; - GIFFARI ZAKAWALI, S.T.P. Jabatan Staf Setda Aceh; c. Rapat koordinasi dan Focus Group Discussion Penanganan Penyelesaian konflik pertanahan di Aceh dengan soft approach dan sosialisasi pembentukan satgas yaitu sengketa lahan telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dipimpin oleh Kasubdi 2 Ditreskrim Polda Aceh (Project Leader). Adapun peserta antara lain - Kasubdi multimedia Bidhuma Polda Aceh; - Pengelola Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda Aceh; - Analisis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Aceh; - Staf subbag program money data dan informasi Ditreskrim Aceh; - Para Kandi Subdi 2 Ditreskrim Polda Aceh; - Staf bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dinas LHK Aceh; - Staf MPU Aceh; - Staf sekretaris MAA Aceh; - Mahasiswa fkip Univ. Malikussaleh; - Mahasiswa FSH un ananry; - Mahasiswa FH univ. Syiah Kuala; - Masyarakat umum. 5. Monitoring dan evaluasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Perubahan dilaksanakan dalam bentuk rapat dan diuraikan dalam Laporan Morev pelaksanaan Proper yang berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Aceh, yang melibatkan seluruh personalia yang terlibat dalam Satgas Yusengan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dipimpin oleh Kasubdi 2 Ditreskrim Polda Aceh (Project Leader). Adapun peserta antara lain. - Pengelola Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda Aceh; - Analisis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Aceh; - Para Kandi dan Panti Subdi 2 Ditreskrim Polda Aceh; - Personel yang terlibat dalam Tim Efektif. F. ANALISA DAN EVALUASI Bahwa pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan yang digagas oleh Kasubdi 2 Ditreskrim Polda Aceh merupakan sebuah formula yang efektif untuk mengoreksi, meminimalisir serta menyelesaikan	sengketa/konflik pertanahan yang terjadi di Aceh. Dibutuhkan dukungan Stakeholder dari Pemprov Aceh (Biro Hukum Setda Aceh) dan Kanwil BPN Provinsi Aceh serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung implementasi Proyek Perubahan ini. G. PENUTUP Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Perubahan yang berjudul "Yusengan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Aceh" ini kami perbuat, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Coach, Mentor dan penguji untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya. Banda Aceh, November 2022 KASUBDI 2 DITRESKRIM POLDA ACEH (signed) Leader MULIAJI, S.H., M.H. AKBP NRP. 73650646
---	--



**PELATIHAN KEPIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL UMUM

NOTA D-1 D-1 A-B

Nomor: BMD-.../VIK/2.5.2022/Desam-2-Resum

Kepada : 1. Yb. Para Kant Subdi 2 Ditreskrim;
2. Yb. Para Pant Subdi 2 Ditreskrim;
Dari : Kasubid 2 Ditreskrim;
Perihal : Rapat More Tim Eklaf Program Perubahan PKN TB, II Angkatan XVIII T.A. 2022.

1. Rujukan:

- Surat Dapil Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4186D/4PDP/07.1 tanggal 13 Juli 2022 Peranggapan Peserta Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka diundang untuk mengikuti Surat Perintah ini.
- Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VIK/2.5.2022/SSOM tanggal 13 Juli 2022 Perintah Pengawasan Peserta Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.
- Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sp/760/VIK/2.5.2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pemberlakuan Tim Eklaf dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada:

a. Hari / Tanggal : Selasa (11 November 2022)
b. Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;
c. Tempat : Aula Ditreskrim Polda Aceh;
d. Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Perubahan yang berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelidikan Konflik Pertahanan Di Provinsi Aceh.

3. Demikian untuk menjadi catatan.

Banda Aceh, 27 Oktober 2022
KASUBID 2 DITRESKRIM POLDA ACEH
M. H. M. H.
KOMASISUS POLSI NRP 7305046

Tembusan:

- Kepala Aceh;
- Inspektur Polda Aceh;
- Ditreskrim Polda Aceh;
- Kepolisian Polda Aceh;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL UMUM

Banda Aceh, 27 Oktober 2022

Nomor : BMD-.../VIK/2.5.2022/Desam
Kualitas : Baik
Lampiran : -
Perihal : -

Kepada :
Yb. UMARANI AZHAR, S.H., M.H.

1. Rujukan:

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Dapil Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4186D/4PDP/07.1 tanggal 13 Juli 2022 Peranggapan Peserta Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka diundang untuk mengikuti Surat Perintah ini.
- Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VIK/2.5.2022/SSOM tanggal 13 Juli 2022 Perintah Pengawasan Peserta Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.
- Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sp/760/VIK/2.5.2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pemberlakuan Tim Eklaf dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang berjudul "Yusenghan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelidikan Konflik Pertahanan Di Provinsi Aceh", dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

a. Hari / Tanggal : Selasa (11 November 2022)
b. Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;
c. Tempat : Aula Ditreskrim Polda Aceh.

3. Demikian untuk menjadi catatan atas dukungan dan kerjasamanya dengan tim kami.

Banda Aceh, 27 Oktober 2022
KASUBID 2 DITRESKRIM POLDA ACEH
M. H. M. H.
KOMASISUS POLSI NRP 7305046

Tembusan:

- P. Gubernur Aceh;
- Kepala Aceh;
- Inspektur Polda Aceh;
- Kanwil BPN Aceh;
- Kepolisian Polda Aceh;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL UMUM

Banda Aceh, 27 Oktober 2022

Nomor : BMD-.../VIK/2.5.2022/Desam
Kualitas : Baik
Lampiran : -
Perihal : -

Kepada :
Yb. TEUKU MANSHUR NASIH, S.H., M.H.

1. Rujukan:

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Dapil Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4186D/4PDP/07.1 tanggal 13 Juli 2022 Peranggapan Peserta Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka diundang untuk mengikuti Surat Perintah ini.
- Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VIK/2.5.2022/SSOM tanggal 13 Juli 2022 Perintah Pengawasan Peserta Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.
- Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sp/760/VIK/2.5.2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pemberlakuan Tim Eklaf dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 yang berjudul "Yusenghan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelidikan Konflik Pertahanan Di Provinsi Aceh", dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

a. Hari / Tanggal : Selasa (11 November 2022)
b. Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;
c. Tempat : Aula Ditreskrim Polda Aceh.

3. Demikian untuk menjadi catatan atas dukungan dan kerjasamanya dengan tim kami.

Banda Aceh, 27 Oktober 2022
KASUBID 2 DITRESKRIM POLDA ACEH
M. H. M. H.
KOMASISUS POLSI NRP 7305046

Tembusan:

- P. Gubernur Aceh;
- Kepala Aceh;
- Inspektur Polda Aceh;
- Kanwil BPN Aceh;
- Kepolisian Polda Aceh;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL UMUM

NOTULEN RAPAT MORE PELAKSANAAN PROGRAM PERUBAHAN YANG BERJUDUL (YUSENGHAN) STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN DI PROVINSI ACEH

Hari / Tanggal : Selasa (11 November 2022)
Pukul : 10.00 WIB s.d 14.00 WIB;
Tempat : Aula Ditreskrim Polda Aceh;
Penyampaian : Kasubid 2 Ditreskrim Polda Aceh (Project Leader);
Peserta : 1. Pengelola Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda Aceh;
2. Analis Hukum Pertahanan Kantor BPN Provinsi Aceh;
3. Para Kant dan Pant Subdi 2 Ditreskrim Polda Aceh;
4. Personel yang terlibat dalam Tim Eklaf;
Materi rapat : Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Perubahan yang berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelidikan Konflik Pertahanan Di Provinsi Aceh

1. Dasar:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Dapil Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4186D/4PDP/07.1 tanggal 13 Juli 2022 Peranggapan Peserta Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022, maka diundang untuk mengikuti Surat Perintah ini.
- Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VIK/2.5.2022/SSOM tanggal 13 Juli 2022 Perintah Pengawasan Peserta Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022.
- Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Sp/760/VIK/2.5.2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pemberlakuan Tim Eklaf dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 di lingkungan Ditreskrim Polda Aceh.
- Surat Deklarasi Resesi Kriminal Umum Polda Aceh Nomor: B/8110X/VIK/2.5.2022/Resum tanggal 15 September 2022 perihal Undangan Rapat Penyusunan Draft Surat Keputusan Gubernur Aceh Pembentukan Satgas Yusenghan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Satgas Yusenghan.
- Surat Deklarasi Resesi Kriminal Umum Polda Aceh Nomor: B/8110X/VIK/2.5.2022/Resum tanggal 24 Oktober 2022 perihal Undangan Focus Group Discussion dan Sosialisasi Pembentukan Satgas Yusenghan Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelidikan Konflik Pertahanan Di Provinsi Aceh.

2. pelaksanaan....

Kepalaasman

Penyampaian monitoring dan evaluasi oleh AKBP MULIADI, S.H., M.H. selaku Project Leader sebagai berikut:

a) Monitoring

- Proyek perubahan berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelidikan Konflik Pertahanan Di Provinsi Aceh digagas oleh Kasubid 2 Ditreskrim Polda Aceh selaku Peserta Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 mendapat respon positif serta mendapat dukungan dari Internal Polri, Stakeholder Kementerian dan Pemerintah Aceh.
- Tahapan (milestone) rencana strategis pada jangka pendek telah dilaksanakan terhadap Dokumentasi dan Evidence Pelaksanaan Proyek perubahan dikumpulkan dan dijadikan dalam bentuk laporan.
- Konsep Draft SK Gubernur dan SOP Pelaksanaan tugas Satgas Yusenghan telah dibuat yang dibuat telah mendapat persetujuan oleh Biro Hukum Setda Aceh dan di persilkan oleh Kanwil BPN dan Kantor Pertahanan Aceh.
- Sosialisasi Proyek perubahan berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelidikan Konflik Pertahanan Di Provinsi Aceh dilakukan dalam kegiatan Focus Group Discussion yang dihadiri oleh Internal terkait dan perwakilan dari Mahasiswa dari 3 (tiga) Perguruan Tinggi (Unswah, UIN dan Unma).
- Konsep / Draft Nota Kesepahaman (MoU) antara Polda Aceh dengan Pemerintah Aceh mengenai tahapan (milestone) rencana strategis pada jangka menengah yang dilaksanakan pada jangka pendek.
- Akan dibentuk Sekelompok terpadu Satgas Yusenghan yang ditempatkan Aula Ditreskrim Polda Aceh. Hal ini telah mendapat persetujuan dari Kepala Aceh yang kemudian akan diawali oleh Perwakilan dari Ditreskrim Polda Aceh, Perwakilan BPN, Perwakilan MAA dan MPU serta Perwakilan dari Dinas LHK dan Disatbrim.
- Ungapan Terimakasih atas dedikasi dan kerjasamanya Tim Eklaf yang telah membantu terlaksananya Proyek perubahan sesuai tahapan (milestone) rencana strategis pada jangka pendek dan diharapkan dukungannya untuk tahapan selanjutnya.

b) Evaluasi

- Perlu penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang merinci setiap tahapan pelaksanaan tugas sehingga memudahkan Pelaksana serta untuk mendukung SOP Pelaksanaan tugas yang telah disusun dalam bentuk Flowchart.
- Selaras dengan implementasi Proyek perubahan berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelidikan Konflik Pertahanan Di Provinsi Aceh sesuai tahapan (milestone) rencana strategis pada jangka pendek, maka diperlukan bantuan namun perlu dukungan anggaran dan sarana serta prasarana untuk mendukung implementasi pelaksanaan Proyek Perubahan.

3. Penutup....

3. Penutup:

Demikian Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Perubahan yang berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelidikan Konflik Pertahanan Di Provinsi Aceh sebagai wujud implementasi Program Perubahan Peserta Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 dibuat sebagai bahan masukan pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Penyampaian Rapat
KASUBID 2 DITRESKRIM POLDA ACEH
Muladi, S.H., M.H.
NRP 7305046

Banda Aceh, 11 November 2022
M. H. M. H.
KOMASISUS POLSI NRP 7305046

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL UMUM

ABSEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN (YUSENGHAN) STRATEGI PENDEKATAN SOFT APPROACH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN DI PROVINSI ACEH

No	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MULIADI, S.H., M.H.	AKBP7305046	KASUBID 2 DITRESKRIM POLDA ACEH	
2	TEUKU MANSHUR NASIH, S.H., M.H.	PERBINA 1870101/04231003	PENGELOLA BANTUAN HUKUM PADA BIRO HUKUM SETDA ACEH	
3	UMARANI AZHAR, S.H., M.H.	PIDAN 1890201/01101101	ANALIS HUKUM PERTAHANAN KANWIL BPN PROVINSI ACEH	
4	GIFARI ZAKWALLI, S.T.P.	PIDAN 189040201/081102	STAF BROS HUKUM SETDA ACEH	
5	FIRMAN, S.H.	AKP65110078	KANT SUBDI 2 DITRESKRIM POLDA ACEH	
6	WILDA LIBIS, S.H.	AKP77800384	KANT SUBDI 2 DITRESKRIM POLDA ACEH	
7	RIWANTY, S.E.	AKP77800384	KANT SUBDI 2 DITRESKRIM POLDA ACEH	
8	MUHAMMAD YACOB, S.P.	IPDA 8201392	PANT SUBDI 2 DITRESKRIM POLDA ACEH	
9	ZAHRI, AHADI	APDA 8200353	BANT IV SUBDI 2 HARDA BANGTAH	
10	CEKIR FAHLEVA, S.H.	APDA 8510190	BANT IV SUBDI 2 HARDA BANGTAH	
11	ACE CAHAN, S.H.	BRIGADIR 00303337	BANT I SUBDI 2 HARDA BANGTAH	
12	TEUKU MUJIF	BRUPU 00303337	BANT I SUBDI 2 HARDA BANGTAH	

Kepalaasman

Penyampaian monitoring dan evaluasi oleh AKBP MULIADI, S.H., M.H. selaku Project Leader sebagai berikut:

a) Monitoring

- Proyek perubahan berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelidikan Konflik Pertahanan Di Provinsi Aceh digagas oleh Kasubid 2 Ditreskrim Polda Aceh selaku Peserta Pelatihan Keperguruan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2022 mendapat respon positif serta mendapat dukungan dari Internal Polri, Stakeholder Kementerian dan Pemerintah Aceh.
- Tahapan (milestone) rencana strategis pada jangka pendek telah dilaksanakan terhadap Dokumentasi dan Evidence Pelaksanaan Proyek perubahan dikumpulkan dan dijadikan dalam bentuk laporan.
- Konsep Draft SK Gubernur dan SOP Pelaksanaan tugas Satgas Yusenghan telah dibuat yang dibuat telah mendapat persetujuan oleh Biro Hukum Setda Aceh dan di persilkan oleh Kanwil BPN dan Kantor Pertahanan Aceh.
- Sosialisasi Proyek perubahan berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelidikan Konflik Pertahanan Di Provinsi Aceh dilakukan dalam kegiatan Focus Group Discussion yang dihadiri oleh Internal terkait dan perwakilan dari Mahasiswa dari 3 (tiga) Perguruan Tinggi (Unswah, UIN dan Unma).
- Konsep / Draft Nota Kesepahaman (MoU) antara Polda Aceh dengan Pemerintah Aceh mengenai tahapan (milestone) rencana strategis pada jangka menengah yang dilaksanakan pada jangka pendek.
- Akan dibentuk Sekelompok terpadu Satgas Yusenghan yang ditempatkan Aula Ditreskrim Polda Aceh. Hal ini telah mendapat persetujuan dari Kepala Aceh yang kemudian akan diawali oleh Perwakilan dari Ditreskrim Polda Aceh, Perwakilan BPN, Perwakilan MAA dan MPU serta Perwakilan dari Dinas LHK dan Disatbrim.
- Ungapan Terimakasih atas dedikasi dan kerjasamanya Tim Eklaf yang telah membantu terlaksananya Proyek perubahan sesuai tahapan (milestone) rencana strategis pada jangka pendek dan diharapkan dukungannya untuk tahapan selanjutnya.

b) Evaluasi

- Perlu penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang merinci setiap tahapan pelaksanaan tugas sehingga memudahkan Pelaksana serta untuk mendukung SOP Pelaksanaan tugas yang telah disusun dalam bentuk Flowchart.
- Selaras dengan implementasi Proyek perubahan berjudul (YUSENGHAN) Strategi Pendekatan Soft Approach dalam Penyelidikan Konflik Pertahanan Di Provinsi Aceh sesuai tahapan (milestone) rencana strategis pada jangka pendek, maka diperlukan bantuan namun perlu dukungan anggaran dan sarana serta prasarana untuk mendukung implementasi pelaksanaan Proyek Perubahan.

3. Penutup....



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022



DOKUMENTASI





SEKRETARIAN SATGAS YUSENGHAN



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMDIKLAT POLRI
TAHUN 2022